

**KEGAGALAN “TRUST-POLITICAL POLICY” SEBAGAI STRATEGI
KEBIJAKAN LUAR NEGERI PARK GEUN HYE (2013-2017)**

SKRIPSI



OLEH:

RIEZKI ADELINA PUTRI
151150049

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2022

**KEGAGALAN “TRUST-POLITICAL POLICY” SEBAGAI STRATEGI
KEBIJAKAN LUAR NEGERI PARK GEUN HYE (2013-2017)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
dengan Spesialisasi Ilmu Hubungan Internasional**



OLEH:

RIEZKI ADELINA PUTRI
151150049

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA
YOGYAKARTA**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA MAHASISWA : RIEZKI ADELINA PUTRI
No. MAHASISWA : 151150049
JUDUL SKRIPSI : KEGAGALAN "TRUST-POLITICAL POLICY"
SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN LUAR
NEGERI PARK GEUN HYE (2013-2017)

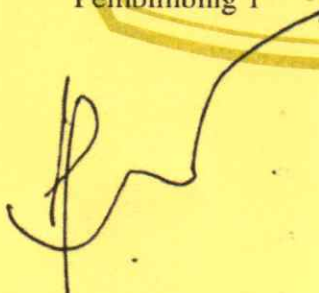
Skripsi ini telah Disetujui untuk Diujikan
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Hikmatul Akbar, S.IP, M.Si.
NIP. 197404092021211005


Dra. Sri Muryantini, M.Si., Ph.D.
NIP. 196403011994320013

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : RIEZKI ADELINA PUTRI
No. MAHASISWA : 151150049
JUDUL SKRIPSI : KEGAGALAN "TRUST-POLITICAL POLICY"
SEBAGAI STRATEGI KEBIJAKAN LUAR
NEGERI PARK'GEUN HYE (2013-2017)

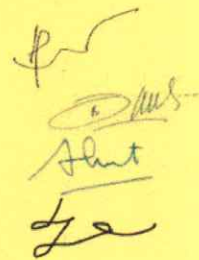
Skripsi ini telah Ditahankan di depan Tim Penguji
Di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

Hari : Rabu
Tanggal : 11 Mei 2022
Waktu : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Ujian Skripsi Jurusan Ilmu Hubungan
Internasional

Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Politik
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta

TIM PENGUJI

Dosen Pembimbing I (Ketua) Hikmatul Akbar, S.IP, M.Si.
Dosen Pembimbing II Dra. Sri Muryantini, M.Si., Ph.D.
Dosen penguji I (Anggota) Ariesani Hermawanto, M.Si., Ph.D.
Dosen penguji II (Anggota) Dr. Nikolaus Loy, MA.



Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional



Dr. Saptopo Bambang Ilkodar, M.Si.
NIP. 196609172021211002

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa saya melakukan kecurangan/penjiplakan/plagiasi, maka saya siap menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yogyakarta, 11 Mei 2022
Yang Menyatakan



Riezki Adéline Putri
151150049

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala berkat dan limpahan rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul “Kegagalan *'Trust-Political Policy'* Sebagai Strategi Kebijakan Luar Negeri Park Geun Hye (2013-2017)”. Skripsi ini ditulis dengan tujuan untuk memenuhi syarat agar dapat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Politik di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Yogyakarta.

Selama proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak dukungan, nasihat, tantangan baik positif maupun negatif serta kritik dan saran yang membangun. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu keseluruhan proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, moril maupun materiil sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Hikmatul Akbar, S.IP., M.Si, selaku Dosen Pembimbing I yang telah membantu banyak dalam memberikan bimbingan, arahan, dan kritik dengan baik dan bijaksana untuk selama proses penulisan skripsi ini;
2. Ibu Dra. Sri Muryantini, M.Si., Ph.D, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan berbagai input positif demi kelancaran dan hasil penulisan skripsi ini;
3. Bapak Ariesani Hermawanto, M.Si., Ph.D, selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini;
4. Dr. Nikolaus Loy, MA., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan kritik dan saran untuk penyempurnaan skripsi ini;
5. Seluruh dosen, karyawan, dan segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang

telah memberikan ilmu, pelayanan, dan membantu penulis selama perkuliahan di Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

6. Kedua orang tua penulis, kakak dan adik, serta segenap keluarga yang dalam segala kondisi telah memberikan doa, dukungan, semangat, dan pelajaran hidup yang tidak ada habisnya baik secara moral, spiritual, maupun finansial kepada penulis serta senantiasa mempercayai penulis dengan tanggung jawab ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan baik;
7. Sobat Delima-ku tersayang, Cita, Wiena, Vina yang selalu memberikan support positif diawal pembuatan skripsi ini. Much Love!
8. Seluruh teman-teman mahasiswa selama di Jogja, HI UPN angkatan 2015 yang selalu mendukung dan membantu selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Penulis barharap skripsi ini dapat memberikan manfaat. Terima kasih

Yogyakarta, 11 Mei 2022

Penulis,

Riezki Adelina Putri

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mengetahui faktor-faktor kegagalan Kebijakan Luar Negeri *Trust-Political Policy* di masa pemerintahan Presiden Park Geun Hye. Kebijakan *Trust-Political Policy* adalah Kebijakan Luar Negeri yang Korea Selatan untuk dapat menormalisasi hubungan inter-Korea demi terwujudnya perdamaian di semenanjung Korea. Namun, serangkaian uji coba nuklir dan memburuknya hubungan inter-Korea di masa pemerintahan Park Geun Hye mengindikasikan kegagalan Kebijakan Luar Negeri tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka, penelitian ini akan menguraikan faktor-faktor kegagalan kebijakan tersebut.

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor domestik dan internasional yang menyebabkan gagalnya Kebijakan Luar Negeri *Trust-Political Policy* di masa pemerintahan Park Geun Hye. Faktor domestik tersebut adalah kegagalan Partai Saenuri memenangkan Pemilu Parlemen tahun 2016. Selain itu, kegagalan ini juga ditengarai oleh corak kepemimpinan Park Geun Hye yang cenderung konservatif. Dari sisi Korea Utara, kebijakan tersebut gagal membangun kepercayaan politik antara Korea Utara dengan Korea Selatan. Di samping itu, terdapat pula faktor Amerika Serikat yang cenderung determinan di dalam kegagalan Kebijakan Luar Negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye.

Kata Kunci: *Trust-Political Policy*, Kebijakan Luar Negeri, Faktor Domestik, Faktor Internasional.

THE FAILURE OF “TRUST-POLITICAL POLICY” AS PARK GEUN HYE'S FOREIGN POLICY STRATEGY (2013-2017)

ABSTRACT

This research aims to find out the factors behind the failure of the Trust-Political Policy Foreign Policy under Park Geun Hye's administration. Trust-Political Policy was South Korea's Foreign Policy which projected to be the ability to normalize inter-Korean relations, especially for peace in the Korean peninsula. However, many incidents in inter-Korean relations, such as some nuclear tests and the worsening of inter-Korean relations during Park Geun Hye's administration have shown the failure of the foreign policy strategies. Using a qualitative approach with a literature study method, this research will describe the failure factors of the policy.

This study find that both domestic and international factors were causing the failure of the Trust-Political Policy Foreign Policy under Park Geun Hye's administration. The main domestic factors that cause the failure was the loss of the Saenuri Party in the 2016 Parliamentary Election. In addition, this failure was also determined by Park Geun Hye's conservative leadership style. From the North Korean side, this policy has failed to build political trust between North Korea and South Korea. In addition, there are also United States factors that tend to be decisive in the failure of Park Geun Hye's Trust-Political Policy Foreign Policy..

Keywords: *Trust-Political Policy, Foreign Policy, Domestic Factors, International Factors.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Alasan Pemilihan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Rumusan Masalah	10
D. Kerangka Pemikiran	10
E. Argumen Pokok	18
F. Metode Penelitian	18
G. Tujuan dan Manfaat Penelitian	19
H. Batasan Penelitian	20
I. Sistematika Penelitian	20
BAB II DINAMIKA HUBUNGAN DUA KOREA PASCA PERANG KOREA	22
A. Hubungan Dua Korea pada Masa Perang Dingin	22
B. Hubungan Dua Korea Pasca Perang Dingin Hingga Abad 21.	28
1. Hubungan Inter-Korea di Masa Pemerintahan Roh Tae Wo (1988-1993).....	28

2.	Hubungan Inter-Korea Dibawah Kebijakan <i>Sunshine Policy</i> (1998-2008)	32
3.	Hubungan Inter-Korea Dibawah Presiden Lee Myung Bak (2008-2012).....	38
C.	Kebijakan <i>Trust-Political Policy</i> Park Geun Hye	40
BAB III	KEGAGALAN <i>TRUST-POLITICAL POLICY</i> KOREA SELATAN DI MASA PEMERINTAHAN PARK GEUN HYE	44
A.	Faktor Domestik	44
1.	Kekalahan Partai Saenuri dan Instabilitas Politik Domestik Korsel	44
2.	Perbedaan Persepsi Lintas Generasi Korsel Tentang Korut	46
3.	Lemahnya Sistem Kelembagaan <i>Trust-Political Policy</i>	48
B.	Faktor-Faktor Internasional	50
1.	Faktor Amerika Serikat	50
2.	Faktor Korea Utara	54
BAB IV	KESIMPULAN	57
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Bantuan Korsel untuk Korut di Masa Pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun (Juta Won)	36
Tabel 2.2 Nilai Perdagangan Inter-Korea Pasca Perang Dingin Hingga Pemerintahan Rohh Moo Hyun (Juta \$ Dollar)	37
Tabel 2.3 Nilai Perdagangan Inter-Korea di Masa Pemerintahan Lee Myung Bak (Juta \$)	39

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Pembagian wilayah semenanjung Korea setelah PD II	3
Gambar 1.2 Peta dari Semenanjung Korea sebelum & sesudah perang .	4
Gambar 2.1 <i>Inter-Korean Summit Tahun 2000</i>	34
Gambar 2.2 Strategi <i>Trust-Political Policy</i> di Masa Pemerintahan Park Geun Hye.....	41
Gambar 3.1 Kesan Masyarakat Korea Selatan terhadap Kebijakan Luar Negeri <i>Trust-Political Policy</i> Presiden Park Geun Hye (dalam%)	47

DAFTAR SINGKATAN

APEC	: <i>Asia Pacific Economic Cooperation</i>
AS	: Amerika Serikat
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
CBMs	: <i>Confidence Building Measures</i>
CVPA	: <i>Chinese People Volunteer Army</i>
DMZ	: <i>Demilitarized Zone</i>
DPRK	: <i>Democratic People's Republic of Korea</i>
EAS	: <i>East Asia Summit</i>
FPA	: <i>Foreign Policy Analysis</i>
KIC	: <i>Kaesong Industrial Park</i>
KLN	: Kebijakan Luar Negeri
Korsel	: Korea Selatan
Korut	: Korea Utara
KPA	: <i>North Korean People's Army</i>
KTT	: Konferensi Tingkat Tinggi
NGO	: <i>Non-Governmental Organization</i>
NPT	: <i>Non-Proliferation Treaty</i>
NUAC	: <i>National Unification Advisory Council</i>
OPM	: <i>Organization Process Models</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
ROK	: <i>Republic of Korea</i>

RRC : Republik Rakyat Cina
THAAD : *Terminal High Altitude Area Defense*
UNC : *United Nations Command*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Korea adalah sebuah wilayah semenanjung di Asia Timur Laut dan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah Utara dan Jepang di bagian Tenggara. Pasca kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II, pada tahun 1945. Perjuangan bangsa Korea yang ingin mendirikan pemerintah independen tidak terwujud karena pasukan Amerika Serikat menduduki bagian Selatan Korea dengan membawa ideologi kapitalisme–demokrasi, sedangkan pasukan Uni Soviet menduduki juga bagian Utara Korea membawa ideologi sosialis komunisnya.

Pembagian Korea menjadi dua pemerintahan yang saling berlawanan menyebabkan terjadinya Perang Korea pada tanggal 25 Juni 1950. Setelah perang berakhir, pemisahan sementara antara Korea Selatan dan Korea Utara ini menjadi permanen dan sampai saat ini semenanjung masih terbagi. Bahkan setelah penandatanganan gencatan senjata pada tahun 1953, konfrontasi Perang Dingin terus berlangsung di Semenanjung Korea.¹

Konflik yang berkepanjangan antara Korea Selatan dan Korea Utara di Semenanjung Korea membawa pengaruh pada perkembangan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara. Presiden Korea Selatan ke-11, Park Geun Hye menerapkan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan *Trust-politic Policy*. Kebijakan *Trust-politic Policy* Park Geun Hye terhadap Korea Utara, adalah kebijakan yang menekankan pada pendekatan yang bertahap dan untuk membangun kepercayaan antar Korea. Namun pada kenyataannya sepanjang tahun 2017, aksi provokatif yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan mengalami peningkatan dan telah memicu kembali ketegangan militer di Semenanjung Korea.

¹ Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. 2012. *Korea: Dulu & Sekarang (한국의 어제와 오늘)*. Seoul: Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata. Hal. 273.

B. Latar Belakang Masalah

Korea merupakan sebuah wilayah semenanjung di Asia Timur Laut dan berbatasan langsung dengan Republik Rakyat Cina di sebelah Utara dan Jepang di bagian Tenggara. Korea Utara dan Korea Selatan merupakan negara yang bersatu bernama Korea, namun setelah penjajahan Jepang berakhir, Uni Soviet dan Amerika Serikat yang memenangkan perang melawan Jepang membagi Korea menjadi 2, Utara dan Selatan, dengan 2 ideologi yang berbeda. Korea Utara di wilayah bagian Utara mengikuti Uni Soviet yang mengalahkan Jepang di sebelah Utara garis 38° Lintang Utara dengan ideologi sosialis komunisnya dengan ibukota Pyongyang. Sedangkan Amerika Serikat yang memenangkan perang melawan Jepang dan mengambil wilayah Korea di sebelah Selatan garis Lintang 38° serta membawa ideologi kapitalisme–demokrasi terpisah tepat pada garis Lintang Utara 38° dengan ibukota Seoul.²

² Andika Fajar Pratama Putra. Oktober 2016. “Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015”. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 3. No. 2. Hal. 1.

Gambar 1.1

Pembagian wilayah semenanjung Korea setelah PD II



Sumber: Marcel Susanto. 2018. "Konflik Sipil-Militer Amerika Serikat dalam Perang Korea". <https://www.zenius.net/blog/19820/konflik-sipil-militer-perang-korea>. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2020.

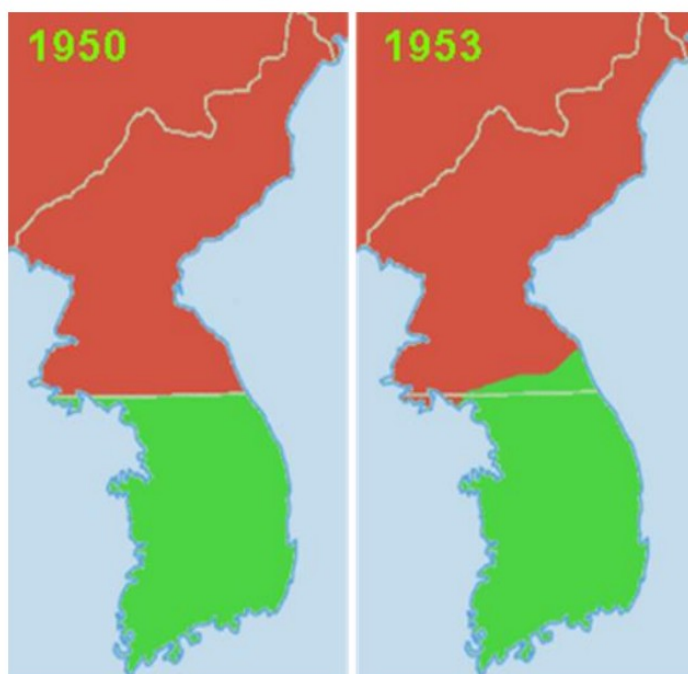
Gambar 1.1 menunjukkan pembagian wilayah Korea menjadi dua pemerintahan yang saling berlawanan menyebabkan terjadinya Perang Korea dikarenakan pasukan militer Korea Utara melewati garis paralel 38° dan menyerbu Korea Selatan pada tanggal 25 Juni 1950. Setelah perang berakhir, pemisahan sementara antara Korea Selatan dan Korea Utara ini menjadi permanen dan sampai saat ini semenanjung masih terbagi. Bahkan setelah penandatanganan gencatan senjata pada tahun 1953, konfrontasi Perang Dingin terus berlangsung di Semenanjung Korea.³ Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengambil sebuah resolusi yang menuntut diadakannya

³ *Ibid.*

pemilihan umum di Korea di bawah pengawasan Komisi Korea dari PBB.⁴ Namun Uni Soviet menolak mengikuti resolusi dari PBB, dan menginterupsi masuknya Komisi Korea–PBB di bagian Utara Korea. Oleh karena itu, Majelis PBB mengambil resolusi lain yang menuntut diadakannya pemilihan umum di wilayah yang dapat dimasuki oleh Komisi Korea–PBB. Pemilihan umum pertama di Korea telah dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1948 di wilayah-wilayah di bawah garis Lintang 38°. Garis lintang yang dibuat oleh negara-negara besar yang akhirnya membagi Semenanjung Korea menjadi Korea Selatan dan Korea Utara.

Gambar 1.2

Peta dari Semenanjung Korea sebelum & sesudah perang



Sumber: “Perang Korea, Konflik Ideologi yang Membelah Semenanjung”. <https://www.reflatwon.com/2012/10/perang-korea-konflik-ideologi-yang.html#.XnxNIjcxXIU>. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2020.

Gambar 1.2 menunjukkan perubahan peta dari Semenanjung Korea sebelum dan sesudah perang. Wilayah yang ditandai dengan warna merah merupakan teritorial dari Korea Utara sedangkan yang berwarna hijau adalah teritorial dari Korea Selatan. Pasca Perang Korea terdapat sebuah zona berjarak 4 km dari perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan yang tidak boleh dilewati oleh kedua

⁴ *Ibid.* Hal. 205.

belah pihak atau yang dikenal dengan nama *Demilitarized Zone* (DMZ) atau zona bebas militer. Keberadaan DMZ adalah buah dari konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara yang berkepanjangan akibat dari pecahnya perang Korea tahun 1950-1953 ini akhirnya menyetujui untuk menandatangani perjanjian gencatan senjata pada tahun 1953.⁵ Namun, konfrontasi Perang Dingin terus berlangsung di Semenanjung Korea. Korea Selatan mengadopsi kebijakan Korea Utara dengan tujuan mencapai Korea bersatu di bawah sistem demokrasi. Sementara itu, Korea Utara mencari cara untuk mencapai tujuannya untuk mengkomunikasikan seluruh semenanjung.

Pelan-pelan Korea Selatan mulai bangkit dengan membangun perekonomiannya. Sedangkan Korea Utara bersikeras dengan ideologinya, dengan lebih mempertahankan kelengkapan dan kemajuan militer negaranya terutama di bidang persenjataan dibandingkan memikirkan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Perang tersebut mempengaruhi perkembangan kebijakan luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dan meningkatnya intensitas konflik antar Korea. Beberapa kebijakan yang sudah diterapkan di antaranya adalah kebijakan luar negeri garis keras pada masa pemerintahan Rhee Syngman (1948-1960) dan Park Chung Hee (1963-1979).⁶ Kebijakan tersebut kemudian berubah ke arah garis lunak ketika munculnya kebijakan *Sunshine Policy* yang populer pada masa pemerintahan Kim Dae Jung (1998-2003), yang kemudian dilanjutkan oleh Roh Moo Hyun (2003-2008) dan Lee Myung Bak (2008-2013).⁷

⁵ Evita. 2015. "Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara: Trust-Politik Policy Park Geun-Hye", Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada. Hal. 7.

⁶ Pada periode pemerintahan Park Chung Hee dinilai memerintah secara ditaktor dan terjadi berbagai kebijakan yang kontroversial. Sehingga banyak ditentang oleh rakyatnya serta memiliki banyak musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Sedangkan pihak Korea Utara, sempat dua kali melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Park. Lihat Felix Nathaniel, "Park Chung-hee: Bapak Pembangunan Korsel yang Mati Dibunuh". <https://tirto.id/park-chung-hee-bapak-pembangunan-korsel-yang-mati-dibunuh-ejU2>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020.

⁷ Kebijakan yang lebih mengedepankan pendekatan secara damai dengan menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan kemanusiaan serta berfokus memajukan rekonsiliasi untuk mengarah pada penyatuan Korea kembali. Lihat Dhita Novebrin Nidia. "Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak", Jurnal HI UMY. Vol. 1. No. 1. Hal. 2., dan *Sunshine Policy* atau Kebijakan Matahari Terbit adalah kebijakan diplomasi Korea Selatan terhadap Korea Utara yang mengedepankan pendekatan secara damai dengan cara menjalin kerjasama di bidang ekonomi dan kemanusiaan serta memajukan rekonsiliasi untuk mengarah reunifikasi. Dengan menciptakan

Namun keharmonisan hubungan Korea Utara dan Korea Selatan tersebut hanya berlangsung beberapa tahun setelah Presiden Korea Selatan Roh Moo Hyung turun tahta dan digantikan oleh Presiden Lee Myung Bak, hubungan kedua Korea menjadi renggang. Pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak haluan kebijakan Korea Selatan untuk Korea Utara menjadi berubah. Hal ini dibuktikan dengan menarik segala jenis bantuan untuk Korea Utara. Penarikan bantuan dilakukan karena sikap Korea Utara yang tidak kunjung menghentikan pengembangan nuklir dan terus melakukan uji coba nuklir.⁸ Presiden Lee menganggap bahwa kebijakan *Sunshine Policy* sudah tidak relevan lagi, karena Presiden Lee merasa bahwa kerjasama dan bantuan yang telah diberikan oleh Korea Selatan selama ini tidak membuat sikap Korea Utara melunak. Terlebih Korea Utara mengeluarkan pernyataan permusuhan terhadap Korea Selatan dengan alasan Presiden Lee tidak ikut bergabung saat pemakaman Kim Jong Il, dan juga dikarenakan pemutusan bantuan dari Presiden Lee dengan menuntut penghentian senjata nuklir.⁹ Sehingga Presiden Lee memutuskan untuk menghentikan kebijakan *Sunshine Policy* terhadap Korea Utara.

Hubungan antar-Korea yang membaik berakhir ketika Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada Oktober 2006, dan efektivitas kebijakan saat itu mendapat kritik berat dari dunia internasional. KTT Inter-Korea kedua terlaksana satu tahun setelah uji coba nuklir tersebut, tetapi kedua Korea tidak mampu memecahkan masalah nuklir, terutama yang sangat berkaitan dengan orang Korea.¹⁰ Karena Korea Utara memiliki ambisi untuk menjadi negara nuklir agar meningkatkan *prestige* dan *bargaining power* mereka. Nuklir Korea Utara yang awalnya hanya sebagai pertahanan keamanan dalam negeri kini meluas dan

paradigma baru dalam hubungan antara kedua negara yang didasari oleh rasa saling menghargai, sehingga akan memberikan pengaruh kepada masa depan rakyat Korea secara keseluruhan menciptakan kerjasama antara keduanya dengan ide utama perdamaian, rekonsiliasi, dan kerjasama. Kebijakan *Sunshine Policy* bertujuan untuk membujuk Korea Utara untuk dapat merubah sikapnya yang konfrontatif dengan cara interaksi dan bantuan ekonomi. Lihat Taufik Resamaili. 2009. "Peredaan Ketegangan dalam Perspektif Konstruktivis: Studi Kasus Konflik Korea Utara – Korea Selatan (2000-2002)". Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal. 62.

⁸ Dhita Novebrin Nidia. *Op. Cit.* Hal. 4.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. *Op. Cit.* Hal. 275.

memprovokasi negara tetangganya. Aksi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan mengalami peningkatan dan telah memicu kembali meletusnya perang di Semenanjung Korea. Oleh karena itu, penting bagi Korea Selatan untuk memperkuat kebijakan luar negerinya terhadap Korea Utara.

Park Geun Hye adalah presiden Korea Selatan ke-11 dari Partai konservatif, Saenuri. Ia terpilih sebagai presiden pada Desember 2012 dan dilantik menjadi presiden perempuan yang pertama di Semenanjung Korea. Berbeda dengan kebijakan beberapa presiden Korea sebelumnya, Presiden Park menerapkan kebijakan luar negeri baru yang ia sebut dengan *Trust-political Policy*.¹¹ *Trust-Political Policy* ini dimaksudkan untuk dapat menormalisasi hubungan antar-Korea yang terpecah sejak Perang Korea.

Grand strategy pada masa kepemimpinan Presiden Park ini memiliki tiga pilar, yaitu kebijakan pertahanan dan keamanan yang kuat, memastikan pelaksanaan *trust diplomacy*, dan membangun rasa saling percaya dalam menyelesaikan konflik di semenanjung Korea. Pada pilar *strong deterrence/defense* bahwa Korea Selatan berdasar atas pertahanan yang kuat akan merespon dengan tegas segala bentuk pelanggaran Korea Utara yang membahayakan perdamaian.¹²

Kebijakan *Trust-politic Policy* Presiden Park terhadap Korea Utara, adalah kebijakan yang menekankan pada pendekatan yang bertahap dan untuk membangun kepercayaan antar-Korea agar unifikasi antar-Korea pada masa mendatang dapat terwujud dan berdasarkan pada perjanjian yang ada, dasar yang kuat dari keamanan, dan upaya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Meskipun dalam menggambarkan kebijakan Korea Selatan terhadap Korea Utara sebagai “proses membangun kepercayaan”, yang pada intinya terletak konsep “kepercayaan”,

¹¹ *Trust-political Policy* merupakan kebijakan luar negeri yang diusung oleh Park Geun Hye dalam rangka usaha ingin membangun kerjasama internasional dengan menggunakan konsep “trust” atau kepercayaan, sebagai pedoman untuk menciptakan kerjasama yang harmonis. *Trust-political Policy* menekankan pada pendekatan yang bertahap dan untuk membangun kepercayaan antar Korea pada masa mendatang dapat terwujud dan berdasarkan pada perjanjian yang ada, dasar yang kuat dari keamanan, dan upaya untuk denuklirisasi Semenanjung Korea. Lihat Charneva Umi Rahmawati dan Septyanto Galan Prakoso. “Trustpolitic Policy Korea Selatan dalam Mewujudkan Unifikasi di Semenanjung Korea Pada Masa Pemerintahan Presiden Park Geun Hye Tahun 2013-2016”. *Jurnal HI UNS*. Vol. 1. No. 3. Hal.3.

¹² Evita. *Op. Cit.* Hal. 8.

bukan berarti kepercayaan tanpa syarat atau sepihak tanpa verifikasi.¹³ Juga tidak berarti melupakan berbagai pelanggaran yang telah dilakukan Korea Utara atau menguntungkan negara dengan insentif baru.

Sebaliknya, harus terdiri dari dua prinsip hidup bersama: Pertama, Korea Utara harus menjaga perjanjian yang dibuat dengan Korea Selatan dan masyarakat internasional untuk menetapkan tingkat minimum kepercayaan; Kedua, harus ada jaminan konsekuensi atas tindakan yang melanggar perdamaian. Untuk memastikan stabilitas, *trust-politic* harus diterapkan secara konsisten dari masalah ke masalah berdasarkan tindakan yang dapat diverifikasi, dan langkah-langkah yang diambil tidak harus untuk kepentingan politik semata. *Trust-politic* sebagai kebijakan luar negeri merupakan perpanjangan alami dari politik Park Geun Hye secara umum, yang merupakan hasil dari Konferensi Korea Selatan-AS dan Konferensi Korea Selatan-Cina, karena mungkin ada rasa saling percaya antara pemimpin dan rasa bersama bahwa hubungan dapat dibangun atas dasar kepercayaan tersebut. Pengalaman sejarah juga memberitahu kita bahwa di antara kemampuan bangsa-bangsa, untuk mempertahankan kerjasama selalu mencerminkan tingkat kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan adalah aset dan infrastruktur publik untuk kerjasama internasional. Selanjutnya, tanpa kepercayaan, perdamaian yang berkelanjutan dan asli tidak dapat dicapai.

Park Geun Hye melakukan kunjungan luar negeri pertamanya sebagai Presiden ke Amerika Serikat pada tanggal 5-9 Mei 2013 untuk menegaskan aliansinya dengan AS. Ia merumuskan dua agenda kebijakan terkait kedua Korea: (1) normalisasi hubungan Korea Utara-Selatan melalui *trust building process* di Semenanjung Korea; (2) mengupayakan unifikasi kecil menuju proses unifikasi yang lebih besar. Park Geun Hye percaya bahwa unifikasi damai akan tercapai melalui tiga tahap: menjaga perdamaian, mengupayaan integrasi ekonomi, dan mencapai integrasi politik. Pemerintahan Presiden Park menawarkan bantuan

¹³ Stephanie Nayoung Kang. September 2014. "Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations". *Jurnal Pasific Forum CSIS. Issues and Insights*. Vol. 14. No. 13. Hal.4.

kemanusiaan untuk Korea Utara, pertukaran dan kerjasama antar-Korea di bidang ekonomi, sosial dan kebudayaan, juga mengedepankan diplomasi dan negosiasi.¹⁴

Isu ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara saat ini masih menjadi topik yang hangat untuk diperdebatkan oleh negara-negara di dunia maupun oleh PBB. Dikarenakan, ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan yang tak kunjung berhenti, namun justru semakin menjadi dengan banyaknya uji coba nuklir yang terus dilakukan oleh Korea Utara yang menjadi kecaman oleh negara-negara di sekitarnya yang menjadi lintasan uji coba nuklir ataupun menjadi target sasaran dalam uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. Dengan adanya hal tersebut, negara-negara sekitarnya seperti Korea Selatan dan Jepang berlomba-lomba untuk meningkatkan kewaspadaan serta keamanan dalam menanggapi serangan-serangan uji coba nuklir dari Korea Utara.

Pada tahun 2017, aksi provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara terhadap Korea Selatan mengalami peningkatan dan telah memicu kembali ketegangan di Semenanjung Korea. Karena sepanjang tahun 2017, Korea Utara telah melakukan beberapa uji coba peluru kendali balistik. Bahkan uji coba nuklir yang dinilai paling provokatif yaitu pada 29 November 2017, saat Korea Utara mengklaim telah berhasil menguji coba rudal balistik baru dengan ‘hulu ledak super besar dan berat’ yang dapat mencapai Amerika Serikat.¹⁵ Rudal tersebut meluncur lebih tinggi dan jauh daripada uji coba yang pernah dilakukan sebelumnya. Uji coba nuklir keenam yang dilakukan Korea Utara telah meningkatkan kekhawatiran dan ketegangan akan kemungkinan pecahnya perang di Semenanjung Korea. Seiring dengan eskalasi militer provokatif yang dilakukan Korea Utara sepanjang 2017 mengindikasikan bahwa Kebijakan *Trust-Political Policy* yang diterapkan oleh Presiden Park mengalami kegagalan.

¹⁴ Seongwhun Cheon. 2013. “Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration”. *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*. NW Washington. DC. <https://www.csis.org/analysis/trust-underlying-philosophy-park-geun-hye-administration>. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2016.

¹⁵ Irvan Yoanda. “Korut Percaya Diri Terus Kembangkan Nuklir Di Tahun 2018”. <https://www.jambur.com/berita/20171231/11553/korut-percaya-diri-terus-kembangkan-nuklir-di-tahun-2018>. Diunduh pada tanggal 27 November 2018.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penelitian ini mengambil rumusan masalah, “Apa faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan ‘*Trust–Political Policy*’ sebagai strategi kebijakan luar negeri Park Geun Hye tahun 2013-2017?”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk memaparkan mengenai penjelasan-penjelasan terkait sebab–akibat terjadinya suatu peristiwa, perlu digunakan suatu teori untuk mendukung peristiwa tersebut. Terkait dengan judul yang diambil, maka akan dipaparkan beberapa teori dan konsep dalam penelitian ini. Maka kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan ini yaitu, teori *Rational Choice Theory* dari Graham T. Allison serta konsep Kebijakan Luar Negeri dari William D. Coplin.

1. Konsep Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan Luar Negeri (KLN) sangat berhubungan erat dengan keberadaan tokoh-tokoh pencetus teori kebijakan luar negeri. Secara garis besar, seperti yang dikatakan oleh Brighi dan Hill bahwa sejatinya KLN harus dilihat sebagai momentum penting suatu proses tindakan, reaksi, tindakan lanjutan di berbagai tingkat dan juga melibatkan aktor-aktor yang berbeda. Dalam hal ini dapat ditarik bahwa, dalam menganalisis kebijakan luar negeri atau *Foreign Policy Analysis* (FPA) tradisional paling tertarik pada keputusan yang diambil oleh pembuat keputusan yang dilakukan oleh otoritas untuk mengalokasikan sumber daya negara. Penekanan berbeda terkait definisi disampaikan oleh Charles Herman, kebijakan luar negeri merupakan perilaku negara atau “*behaviour of states*”. Berbeda, Bruce Russett, Harvey Starr, dan David Kinsella mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai pedoman dalam tindakan luar negeri yang diambil suatu negara untuk mencapai *nation interest* atau tujuan negara. Kemudian dua definisi tersebut digabungkan oleh Deborah Gerner, kebijakan luar negeri sebagai niat, pernyataan, dan tindakan seorang aktor (tidak selalu negara) terhadap hal hal yang berkaitan dengan urusan luar negeri sekaligus sebagai dan respons mereka kepada aktor internasional lain. Meskipun akademisi mendefinisikan kebijakan luar negeri

sebagai pedoman tindakan negara terkait hal-hal luar negeri, mereka juga menekankan bahwa studi kebijakan luar negeri harus melibatkan hal-hal terkait perumusan dan implementasi kebijakan.¹⁶

Menurut William D. Coplin, untuk menganalisa kebijakan luar negeri suatu negara, fokus utamanya adalah melihat peran pemimpin negara dan menyatakan bahwa suatu tindakan politik luar negeri negara tersebut dianggap sebagai akibat dari tiga pertimbangan yang memengaruhi para pembuat keputusan.¹⁷ Pertama, situasi politik domestik negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional sebagai proyeksi dan manifestasi dari politik domestik terhadap negara yang menjadi tujuan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri dalam konteks ini merupakan keputusan sebagai bentuk dari akumulasi perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dirumuskan di dalam negeri yang kemudian diimplementasikan keluar sebagai upaya mencapai kepentingan nasional. Faktor dibagi dalam 3 golongan yaitu keadaan internal, eksternal, dan proses pembuatan keputusan. Keadaan internal adalah kepada siapa pejabat membuat keputusan. Dorongan ini mencakup orientasi utama nilai yang sama, ciri pokok organisasi sosial, bentuk dan fungsi kelompok, pola kelembagaan, pembentukan pendapat, dan pembedaan dan pengkhususan sosial. Kelompok ini termasuk NGOs dan *civil society*.

Selain NGOs dan *civil society*, kelompok ini juga termasuk kelompok *policy influencer* yaitu partai politik yang memengaruhi, dan memiliki tujuan untuk menerjemahkan tuntutan masyarakat menjadi tuntutan politis terkait kebijakan pemerintah. *Influencer* ini banyak memfokuskan perhatian pada masalah pembentukan kebijakan dalam negeri, dan berusaha memengaruhi kebijakan luar

¹⁶Vina A.E. Khawarizmi. 2021. Review Week 2: Perkembangan Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri dalam Hubungan Internasional. Hal. 3. https://www.researchgate.net/publication/348404880_REVIEW_WEEK_2_PERKEMBANGAN_TEORI_ANALISA_KEBIJAKAN_LUAR_NEGERI_DALAM_HUBUNGAN_INTERNASIONAL/link/61c28727abfb4634cb351cd0/download. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2022.

¹⁷ William D. Coplin. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis* (diterjemahkan oleh Mercedes Marbun). Bandung: CV Sinar Baru. Hal. 29-30.

negeri terutama ketika kebijakan-kebijakan itu memiliki dampak yang sangat signifikan bagi stabilitas politik dalam negeri.

Pentingnya peran masyarakat sipil terletak pada kemampuannya dalam menyediakan ruang publik untuk berinteraksi tentang nilai-nilai sosial yang beragam dan interaksi berbagai kepentingan. Seperti yang terlihat, masyarakat sipil Korea Selatan telah memainkan peran aktif dalam beberapa dekade dalam demokratisasi Korea Selatan maupun perdebatan tentang berbagai isu politik dalam dan luar negeri Korea Selatan yang berhubungan dengan Korea Utara di semenanjung Korea sepanjang menuju reunifikasi kedua Korea.

Kebijakan *Trust-political Policy* yang merupakan kebijakan yang didasar dengan membangun kepercayaan diantara kedua Korea. Kebijakan *Trust-political Policy*, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor eksternal yang menjadi dasar yaitu eskalasi ancaman dari Korea Utara, adanya dukungan internasional kepada Korea Selatan, adanya sanksi PBB terhadap Korea Utara, serta menguatnya aliansi Korea Selatan–AS. Sedangkan, faktor internal yaitu perubahan haluan Partai Saenuri, Persepsi Park Geun Hye terhadap Korea Utara, dan Peran NGOs dan *Civil Society* Korea Selatan. Kebijakan ini bertumpu pada sikap membangun “kepercayaan” untuk digunakan sebagai ruang diplomasi, dimana membangun kepercayaan di Semenanjung Korea adalah salah satu manifestasi kebijakan *Trust-Political Policy* di bawah pemerintahannya.

Keadaan eksternal berupa aksi–reaksi negara lain dan masyarakat untuk siapa mereka bertindak, serta dunia fisik, dan proses pembuatan keputusan yang timbul di dalam organisasi pemerintah. Kebijakan *Trust–Political Policy* Park Geun Hye didasarkan pada pertimbangan peningkatan ancaman Korea Utara terhadap Korea Selatan, yang diharapkan dapat memperbaiki hubungan bilateral antar-Korea.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, penelitian ini akan menggunakan pendekatan konsep Kebijakan Luar Negeri untuk menganalisa kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* di masa pemerintahan Park Geun Hye. Dalam hal ini penelitian ini akan berfokus kepada pengambil keputusan, NGO serta peran masyarakat sebagai aktor determinan dalam kegagalan *Trust-Political Policy* Park

Geun Hye.

2. Rational Choice Theory

Pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri paling sering menggunakan *Rational Decision-Making Model* atau sering dikenal dengan *Rational Choice Theory*, yang mana digunakan sebagai alat menjelaskan pilihan dan melihat perilaku para pembuat keputusan. *Rational Choice Theory* muncul bersamaan ketika pandangan realis sedang menonjol dalam hubungan internasional. Hal ini kemudian digunakan sebagai pilihan yang paling rasional dalam menentukan perilaku dan tindakan negara untuk menghitung kekurangan dan keuntungan dari tindakan tersebut, sehingga memilih salah satu pilihan yang paling menguntungkan. Menurut Allison, *Rational Choice Theory* terbagi menjadi tiga model dalam proses pengambilan keputusannya yaitu;¹⁸

a. Rational Actor Model

Rational Actor Model merupakan model proses pembentukan kebijakan luar negeri yang paling sering digunakan, di mana berada dalam lingkungan internasional yang menentukan aksi negara sebagai aktor dan membuat suatu pilihan yang rasional.¹⁹ Menurut Allison, keamanan nasional dan kepentingan nasional merupakan prinsip utama dalam menyusun kebijakan luar negeri.²⁰ *Rational Actor Model* melakukan pilihan terhadap kebijakan luar negeri sebagai produk ideal. Mengingat pengambil keputusan yang rasional mengambil mempertimbangkan tujuan kebijakan luar negeri dan menentukan yang mana untuk mengambil pilihan yang paling prioritas di antara pilihan yang lain. Hal ini juga merupakan sebagai upaya untuk menjelaskan peristiwa internasional dengan berlandaskan tujuan dan perhitungan negara atau pemerintah.²¹

Sebagai aktor rasional, terutama pemerintah mempunyai nilai (perhitungan), yang mana aktor tersebut mengumpulkan pilihan, informasi, resiko berat, yang kemudian memilih dan membuat rencana dari setiap pilihan sebagai

¹⁸ Graham T. Allison. 2009. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company Limited. Hal. 690.

¹⁹ Lloyd Jensen. 2012. *Explaining Foreign Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc. Hal. 5.

²⁰ Allison. *Op. Cit.* Hal. 33.

²¹ *Ibid.* Hal. 10.

suatu cara untuk memprediksi apa yang akan terjadi jika mengambil pilihan tersebut. Dengan asumsi ini, pembuat keputusan menghitung nilai yang diharapkan dari setiap pilihan, membandingkan semua pilihan, dan memilih pilihan yang paling rasional dan menguntungkan.²² Hal ini merupakan sebagai penjelasan satu tujuan yang memungkinkan interpretasi perilaku sebuah negara untuk memilih pilihan yang memaksimalkan nilai tersebut.²³ Adapun beberapa indikator dalam mempengaruhi *Rational Actor Model* ialah: 1) *Goals and Objective*; 2) *Alternatives*; 3) *Consequences*; dan 4) *Choice*.

Pertama *Goals and Objective*, mewakili adanya nilai atau utilitas dari sebuah keputusan yang di ambil, yang mana di harapkan setiap aktor dapat menentukan urutan preferensi setiap kemungkinan konsekuensi yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut, di mana tiap konsekuensi mengandung sejumlah efek samping dari yang dihasilkan. Kedua *Alternatives*, hal ini mengharuskan setiap aktor rasional harus memilih salah satu di antara alternatif sebelum aktor tersebut terjebak dalam situasi tertentu. Dalam pengambilan keputusan, alternatif ini direpresentasikan sebagai pohon keputusan yang mana dari tindakan-tindakan alternatif tersebut mencakup tindakan sederhana namun spesifikasi suatu tindakan tersebut harus cukup tepat untuk membedakannya dari alternatif lain sehingga meminimalisir kerugian yang di dapatkan. Ketiga *Consequence*, konsekuensi merupakan hasil yang akan terjadi untuk setiap alternatif yang telah dipilih. Keempat *Choice*, yang mana merupakan pilihan-pilihan dalam alternatif yang konsekuensinya dapat menduduki peringkat tertinggi dalam mengambil keputusan. Dari berbagai konsep di atas tersebut telah mencakup ekonomi, keputusan, teori permainan, serta gagasan yang terstruktur yang mendasari asumsi manusia sehari-hari dari tujuan manusia baik dalam perilaku individu dan di internasional dalam kebijakan luar negeri. Hal tersebut bertujuan untuk memilih pilihan yang konsisten dan memaksimalkan nilai dengan berbagai hambatan yang terjadi.²⁴

Dalam konteks negara, para pembuat keputusan akan diminta untuk berhati-

²² *Ibid.* Hal. 29.

²³ *Ibid.* Hal. 11.

²⁴ *Ibid.* Hal. 30.

hati memberikan keputusan dengan mencari tahu apa yang harus diharapkan dan dibutuhkan. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan keuntungan dan kerugian, tetapi juga memperkirakan kemungkinan dari berbagai hasil yang akan di dapatkan. Jika aktor gagal atau tidak mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya, maka hal tersebut merupakan kesalahan dalam pengumpulan data informasi, perhitungan yang salah atau pilihan rasional tersebut yang salah. Model ini, berasumsi setiap aktor tidak bisa mempertimbangkan semua konsekuensi yang mungkin terjadi. Ketika sebuah konsekuensi buruk tertentu muncul, yang dapat dilakukan adalah memodifikasinya untuk mengurangi kemungkinan konsekuensi itu berulang akan tetapi dengan tingkat yang berbeda.

Model ini banyak dikenal sebagai model strategi atau model aksi–reaksi, yang mana biasa digunakan untuk menerapkan tiap respon sebagai perhitungan rasional untuk menghadapi tindakan yang dilakukan oleh aktor lain. Aktor rasional dalam pengambilan keputusan berkaitan juga dengan lingkungannya, di mana lingkungan tersebut meliputi informasi yang berkaitan dengan aktor lain. Namun, aktor lain mengetahui tindakan-tindakan aktor tersebut. Situasi tersebut dapat mempersulit aktor rasional untuk memprediksi hasil dan reaksi dari tindakan yang telah dipilih. Hal ini yang menjadikan aktor rasional menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusannya.

Dalam penelitian ini, pendekatan model ini akan digunakan untuk menganalisa bagaimana aktor di dalam menentukan kebijakannya. Dalam hal ini, pihak Korsel akan menganalisa perumusan kebijakan *Trust-Political Policy* oleh Park Geun Hye, serta bagaimana respon Korea Utara dalam hal ini, Kim Jong Un merespon kebijakan tersebut dari pertimbangan rasional. Selanjutnya, akan dilakukan analisis faktor-faktor rasional negara-negara lain, dalam hal ini Amerika Serikat dalam memformulasikan kebijakan kepada 2 Korea yang turut mempengaruhi kebijakan *Trust-Political Policy* di masa pemerintahan Park Geun Hye.

b. *The Organization Process Models (OPM)*

Allison menjelaskan bahwa model ini seperti, sebuah kolongmerat dan organisasi semi–feodal yang bekerja sama dengan pemerintah agar dapat bergerak

sendiri sebagai pengambil keputusan, yang mana sebagai tindakan yang dipilih oleh satu kesatuan, pembuat keputusan rasional, kendali pusat dan memaksimalkan nilai yang mempunyai kedudukan secara formal.²⁵ Model ini menjelaskan bahwa terdapat tindakan pemerintah sebagai *output* organisasi yang dikoordinasikan secara parsial oleh sekelompok pemimpin yang bersatu sebagai dasar perilaku pemerintah untuk membuat pilihan dari pembuat keputusan kesatuan. Dengan demikian, perilaku pemerintah dalam menangani masalah penting telah di pengaruhi oleh pendapat *output* dan input dari beberapa organisasi.

Model ini menganggap bahwa tujuan dan sasaran telah dibentuk secara baik, membatasi pilihan berdasarkan standar operasional prosedur, membuka jalan pembuatan kebijakan yang dipengaruhi oleh organisasi-organisasi multilateral atau lembaga dalam negara, setiap organisasi memiliki masing-masing fungsi dan misi. Model ini telah ditentukan dengan pertimbangan dalam mencapai tujuan organisasi yang bekerja sama tersebut seperti, anggaran (dana keuangan), standar operasional prosedur yang meningkatkan efisiensi dan kinerja. Dengan demikian, pembuat keputusan dapat menggunakan batasan untuk mempersempit beberapa pilihan alternatif yang menjanjikan dan hasil yang baik. Akibat dari perilaku-perilaku organisasi tersebut menimbulkan masalah tertentu dalam pemerintahan seperti, tindakan pemerintah yang harus berdasarkan oleh tujuan dan sasaran dalam organisasi di dalamnya. Hal tersebut merupakan tindakan pemerintah sebagai output dari organisasi yang sangat berbeda dari Model I.²⁶

Model ini akan digunakan untuk menganalisis kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* menggunakan pendekatan organisasional. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa bahwa terdapat tindakan pemerintah sebagai *output* organisasi yang dikoordinasikan secara parsial oleh sekelompok pemimpin yang bersatu sebagai dasar perilaku pemerintah untuk membuat pilihan dari pembuat keputusan kesatuan. Dengan demikian, perilaku pemerintah dalam menangani masalah penting telah di pengaruhi oleh pendapat *output* dan input dari beberapa organisasi.

²⁵ *Ibid.* Hal. 67.

²⁶ *Ibid.* Hal. 68.

c. *Governmental (Bureaucratic) Politics Model*

Allison juga menjelaskan tentang perilaku pemerintah yang bukan sebagai output organisasi melainkan hasil dari permainan tawar-menawar. Hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan yang mana pemilihan berdasarkan dukungan dari birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil. Berbeda dengan model I, model politik pemerintah (birokrasi) ini tidak melihat aktor kesatuan melainkan dari banyak aktor sebagai yang menangani tidak hanya fokus satu isu masalah tetapi pada banyak masalah intra-nasional.

Model ini berdasarkan dengan aktor individu yang merupakan kunci pengambilan keputusan berdasarkan pengaruh birokrasi, di mana aktor tersebut memiliki pengaruh besar dalam menentukan tindakan birokrasinya seperti, perbedaan birokrasi, berbeda saran yang diajukan dan hubungan komunikasi antar kekuasaan informal dan formal dalam negara. Keuntungan dari model ini adalah, model menambahkan gambaran penting yang rinci tentang politik dalam negeri, membantu menjelaskan peran birokrasi dalam pemerintah, membantu menjelaskan mengapa tiap birokrasi bekerja sesuai perannya, namun terjadi pertentangan dengan kepentingan pemerintah pada umumnya, membantu menjelaskan mengapa kebijakan terkadang muncul irasional berdasarkan perspektif kesatuan pemerintah (eksekutif), tetapi kelemahannya yaitu, sulit untuk mempelajari dan menganalisis dan terlalu banyak variabel.²⁷

Dari ketiga model tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam model I menggambarkan alasan mengapa memilih pilihan rasional tersebut untuk membuat keputusan. Model II menggambarkan terkait *output* dari organisasi yang telah dipilih sebagai pilihan rasional untuk mengambil keputusan. Model III

²⁷ *Ibid.* Hal. 145.

menggambarkan mengapa banyak para aktor ikut berpartisipasi dalam menangani berbagai masalah dan membuat pilihan rasional. Dari ketiga model tersebut juga dapat menghasilkan adanya pemikiran mengenai *cost-benefit*, di mana memahami pilihan-pilihan yang memaksimalkan nilai yang akan di dapatkannya sebelum keputusan tersebut bersifat keputusan akhir.²⁸

Dari penjelasan di atas dapat ditarik benang merah bahwa penelitian ini akan menggunakan model dari *Rational Actor Model* di dalam menganalisa kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* di bawah pemerintahan presiden Park Geun Hye. Penelitian ini akan mencoba menganalisa model *rational actor*, *organization* dan *government* di dalam kegagalan *Trust-Political Policy* pada tahun 2013-2017.

Untuk mendapatkan hasil yang objektif, penelitian ini akan menganalisa 3 aktor utama, yaitu Korea Selatan sebagai pembuat kebijakan, Korea Utara sebagai objek kebijakan, dan dunia internasional, dalam hal ini Amerika Serikat yang turut memberikan pengaruh yang signifikan di dalam kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye.

E. Argumen Pokok

Berdasarkan kepada uraian masalah dan uraian kerangka pemikiran yang telah dijelaskan di atas maka dapat ditarik argumen utama yaitu, bahwa kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* sebagai strategi kebijakan luar negeri Park Geun Hye karena faktor domestik dan internasional.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Menurut David William, penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara

²⁸ *Ibid.* Hal. 251.

alamiah.²⁹ Sedangkan deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.³⁰ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami dan menafsirkan sebuah perilaku atau interaksi sosial. Penelitian kualitatif berusaha untuk memenuhi makna, proses dan konteks sebuah perilaku atau interaksi sosial yang sedang diamati.³¹

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan teknik pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan metode *library research* untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dan relevan dengan topik yang dibahas. Data-data yang menyangkut dengan topik yang dibahas dapat didapatkan melalui buku, jurnal, dokumen, majalah, surat kabar harian, laporan penelitian, dan data-data dari internet untuk menguatkan data serta memperdalam pengetahuan tentang masalah yang diteliti, sehingga rumusan masalah penelitian dapat dijawab.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data yang termasuk ke dalam jenis data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur seperti buku, artikel, jurnal ilmiah, surat kabar dan media internet. Adapun data-data yang dibutuhkan adalah data yang relevan dan berkaitan langsung dengan topik yang akan dibahas oleh penulis yaitu tentang faktor-faktor penyebab kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Politic Policy* Park Geun Hye di Korea Selatan.

G. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Analisis ini bertujuan memberikan pemahaman tentang faktor-faktor kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Politic Policy* Korea Selatan pada tahun 2013-2017 serta faktor internal dan eksternal yang memberikan pengaruh yang

²⁹ Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (edisi revisi). Cetakan kedua puluh dua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset. Hal. 5.

³⁰ Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Hal. 29.

³¹ Umar Suryady Bakry. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hal. 18.

sangat besar dalam perkembangan hubungan bilateral antar-Korea. Penelitian ini juga akan menjelaskan tentang tentang progres reunifikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan dalam upaya menciptakan perdamaian selama kebijakan *Trust-Politic Policy* berlangsung.

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan yang berguna bagi perkembangan keilmuan studi Hubungan Internasional dalam mata kuliah Studi Keamanan.

H. Batasan Penelitian

Untuk membatasi jangkauan penelitian agar tetap fokus dalam konteks, maka hanya akan terfokus pada analisa pengaruh kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye dalam memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara pada tahun 2013-2017. Alasan pemilihan tahun 2013 karena merupakan awal diterapkannya kebijakan *Trust-Politic* yang diusung oleh Park Geun Hye sebagai Presiden Korea Selatan menggantikan kepemimpinan Lee Myung Bak sebelumnya, dan tahun 2017 karena berakhirnya masa kepemimpinan Park Geun Hye sebagai presiden. Penerapan kebijakan luar negeri ini terkait dengan dinamika politik luar negeri Korea Selatan sebelumnya sebagai hasil evaluasi serta respon dari Korea Utara. Adapun kebijakan luar negeri Presiden sebelum Park Geun Hye yang dibahas adalah sebatas ulasan untuk lebih memahami latar belakang serta pertimbangan historis ketika Park Geun Hye merumuskan *Trust-Politic Policy*.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari skripsi ini disusun dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari:

Bab Satu, berisi pendahuluan yang terdiri dari alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka pemikiran, hipotesa atau argumen pokok, metode penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, serta batasan penelitian.

Bab Dua, membahas tentang bagaimana dinamika hubungan antara dua Korea pada pasca perang Korea, yang terdiri dari bagaimana hubungan kedua negara pada masa perang dingin, hubungan dua Korea pasca perang dingin hingga

abad 21,serta bagaimana kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye diterapkan di Korea Selatan.

Bab Tiga, membahas tentang kegagalan *Trust-Political Policy* Korea Selatan di masa pemerintahan Park Geun Hye, yang terdiri dari faktor-faktor domestik penyebab kegagalan *Trust-Political Policy* di Korea Selatan, serta faktor-faktor internasional yang ikut andil dalam kegagalan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye.

Bab Empat, merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini.

BAB II

DINAMIKA HUBUNGAN DUA KOREA PASCA PERANG KOREA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang dinamika pasang surut hubungan diplomasi antar-Korea pasca Perang Korea hingga abad 21 dan kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye yang diterapkan di Korea Selatan. Untuk memudahkan pemahaman, penelitian ini akan membagi bab ini menjadi 3, yakni dinamika hubungan dua Korea saat Perang Dingin dan Pasca Perang Dingin, serta kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye di Korea Selatan.

A. Hubungan Dua Korea pada masa Perang Dingin

Jika dilakukan penelusuran sejarah yang panjang, terdapat beberapa periode perebutan kekuasaan kerajaan di Semenanjung Korea. Meskipun demikian, dinasti terakhir yang berkuasa di Korea, Dinasti Chosŏn, memerintah Korea yang bersatu dengan etnis yang homogen selama lebih dari 500 tahun, sampai Jepang menganeksasi Korea pada tahun 1910.¹

Seperti yang telah dibahas pada latar belakang masalah, pembagian Korea di Garis Pararel 38° oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet merupakan pembagian yang berdasarkan pertimbangan geopolitik. Hal tersebut tidak berdasarkan pada pembagian geografis atau pemecahan budaya yang sudah ada sebelumnya di Korea. Hal ini mengindikasikan bahwa walaupun Korea terbagi menjadi 2, mereka adalah bangsa yang sama. Hal ini berarti kedua bangsa yang terpisah ini memiliki keinginan untuk reunifikasi.

Deklarasi Kairo pada tahun 1943, yang berisi pernyataan perang untuk Jepang yang dideklarasikan oleh Amerika Serikat, Inggris, dan Republik Cina,

¹ Daniel Wertz. Januari 2017. "Inter-Korean Relations". The National Committee on North Korea. *NCKK*.
https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-briefs/NCNK_Issue_Brief_ROK%20DPRK.pdf.
Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2021.

menyatakan bahwa “*in due to course Korea shall become free and independent*”.² Pada akhir Perang Dunia II, Uni Soviet dan Amerika Serikat sepakat untuk pembagian sementara Korea di Garis Pararel 38° hingga pemerintahan sementara dapat terbentuk. Sayangnya, pecahnya Perang Dingin sesaat setelah Perang Dunia II berakhir mengakhiri rencana unifikasi Korea dibawah mediasi internasional. Seiring berjalannya waktu, pembagian Semenanjung Korea menguat. Republik Korea (*Republic of Korea; ROK*) di bagian Selatan mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 15 Agustus 1948. Republik Rakyat Demokrasi Korea (*Democratic People's Republic of Korea; DPRK*) di Utara menyusul deklarasi kemerdekaan beberapa bulan setelahnya. Kedua negara ini sama-sama mengklaim seluruh Semenanjung Korea dan mendeklarasikan unifikasi sebagai objektifitas yang penting.³

Perang Korea pecah pada tanggal 25 Juni 1950, dimana Tentara Rakyat Korea (*North Korean People's Army; KPA*) menginvasi dan dengan cepat menduduki banyak bagian hingga pertengahan Selatan Semenanjung Korea. Amerika Serikat mengintervensi di dalam konflik dibawah perlindungan Komando PBB (*United Nations Command; UNC*). Hal tersebut direspon Cina dengan mengirimkan Tentara Rakyat Sukarela Cina (*Chinese People Volunteer Army; CPVA*).⁴ Setelah perang ini, beberapa dinamika pasang surut hubungan antar Korea terjadi.

Negosiasi untuk mengakhiri Perang Korea dimulai pada 10 Juli 1951, di Kaesong, Korut. Meskipun Korut dan Korsel bertekad untuk menyatukan kembali kedua negara. Amerika Serikat dan Republik Rakyat Cina (RRC), tampak mendorong restorasi status quo sebelum perang sebagai harga sebuah perdamaian. Perundingan selama 2 tahun hingga 1953, mencapai kesepakatan dalam gencatan senjata (*An armistice agreement*). Presiden Hary S. Truman secara tegas menyatakan siapa yang bertanggung jawab di balik alotnya perundingan tersebut.

² Cairo Communique. December 3, 1943. http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryo/01/002_46/002_46_001r.html. Diunduh pada tanggal 4 April 2021.

³ Daniel Wertz, *Loc. Cit.*

⁴ *Ibid.*

“Sejak perundingan pertama kali,” Ia menulis di dalam memoarnya, “Pihak Komunis membuktikan bahwa mereka berniat mengulur waktu dan menunda hingga mereka mendapatkan yang mereka inginkan dengan cara-cara mereka.”⁵

Tepatnya pada tanggal 27 Jul 1953, UNC yang diwakili oleh Amerika Serikat, KPA, dan CPVA menandatangani *Armistice Agreement* ini yang mengawali pendirian *demilitarized zone* (DMZ) sepanjang Semenanjung Korea.⁶ Meskipun Korsel merupakan negara penandatangan perjanjian sebagai anggota UNC, militernya bukan penandatangan langsung. Hal ini menyebabkan gencatan senjata menimbulkan beberapa masalah yang belum terselesaikan, seperti permasalahan perbatasan maritim. Dalam konteks yang lebih signifikan, Konferensi Jenewa 1954 yang diadakan sebagai ketentuan gencatan senjata, gagal mencapai penyelesaian damai yang diharapkan.⁷

Dampak kematian dan kerusakan yang disebabkan oleh Perang Korea membuat permusuhan dua negara di satu semenanjung ini menguat. Setelah Perang Korea berakhir, Pyongyang dan Seoul berlomba mendapatkan legitimasi dan pengakuan internasional. Pengembangan kepemimpinan diktator mencuat di bagian Selatan, serta pemerintahan sentralisasi rezim personal menguat di bagian Utara. Perbedaan ini mengakibatkan hampir tidak ada kontak antar pemerintah diantara 2 Korea dalam beberapa dekade setelah Perang Korea.⁸

Charles K. Armstrong bahkan mengkategorikan hubungan kedua Korea sebagai “*existential antagonism*”. Masing-masing negara Korea melihat keberadaan rivalnya merupakan ancaman akan keberadaannya sendiri, dan masing-masing memiliki tujuan eksplisit untuk mengeliminasi yang lain. Bagi Korsel,

⁵ James I. Matray. 2012. “The Korean Armistice Negotiation at Kaesong”. *Pacific Historical Review*. Vol. 81, No. 2. Hal. 221. Doi: 10.1525/phr.2012.81.2.221.

⁶ The Korean War Armistice Agreement. *Article 1*. https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/G_Armistice_Agreement.pdf. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2021.

⁷ Daniel Wertz. *Loc. Cit.*

⁸ Mitchell Lerner. 2010. ““Mostly Propaganda in Nature”: Kim Il Sung, the Juche Ideology and the Second Korean War”. *North Korea International Documentation Project (Working Paper #3)*. Hal. 5.

https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/misc/NKIDP_Working_Paper_3_Kim_Il_Sung_Juche_Ideology_Second_Korean_War_web.pdf. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.

Korut merupakan rezim yang tidak sah dan dikategorikan sebagai ancaman yang membutuhkan upaya pertahanan. Sedangkan bagi Korut, Korsel merupakan negara dengan rezim yang lemah dan tidak stabil yang akan kolaps dalam jangka dekat maupun jangka panjang. Dengan demikian, Korut bersiap dan menunggu waktu untuk masuk dan menyatukan kembali Korea saat waktunya tiba.⁹

Hubungan antar-Korea kurang lebih sama dengan Doktrin Hallstein di Jerman Barat atau kebijakan Cina terhadap Taiwan, yakni menolak untuk mengakui keberadaan negara lawan. Di sisi lain memelihara hubungan diplomatik dengan negara luar yang mengakui kedaulatannya. Dalam konteks bipolarisme dalam Perang Dingin, kedua negara Korea mendukung blok yang berlawanan. Hal ini memicu konfrontasi Korea Utara–Selatan dan memperlebar kontak diplomatik diantara keduanya.¹⁰

Implikasi yang paling nyata terlihat dari penjelasan diatas adalah rentetan ketegangan hubungan Korut–Korsel pada akhir dekade 1960an. Pada Oktober 1966, kedua negara terlibat konflik di DMZ. Konflik ini dimulai ketika pasukan dari kedua negara menyerbu zona demiliterisasi dan terlibat dalam pertempuran kecil.¹¹ Selain menewaskan 30 tentara Korsel, pertempuran ini juga menewaskan sedikitnya 6 orang tentara Amerika Serikat.¹² Dalam 9 bulan pertama tahun 1967, jumlah kematian yang diakibatkan oleh konflik ini mencapai angka 300 orang.¹³

⁹ Charles K. Armstrong. 2005. “Inter-Korean Relations in Historical Perspective”. *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 14. No. 2. Hal. 4. <https://core.ac.uk/download/pdf/31065567.pdf>. Diunduh pada tanggal 7 Mei 2021.

¹⁰ *Ibid.* Hal. 5.

¹¹ Moira Lavelle. 20 Agustus 2015. A Brief History of Border Conflict Between North and South Korea. *The World*. <https://www.pri.org/stories/2015-08-20/brief-history-border-conflict-between-north-and-south-korea>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.

¹² _____. 20 Agustus 2020. Assaults Along the Korean Demilitarized Zone, 1966-69. *Weapons and Warfare*. <https://weaponsandwarfare.com/2020/08/20/assaults-along-the-korean-demilitarized-zone-1966-69/>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.

¹³ Perkiraan jumlah korban militer dalam konflik ini bervariasi dari berbagai sumber, tetapi faktanya jumlah kasus kematian memang tergolong besar. Estimasi diatas didasarkan pada pertemuan Mr. Bundy, Agen Eksekutif AS dengan Mr. Colby, anggota CIA pada 15 September 1967. Memorandum of Conversation. (Washington, 15 September 1967). *Foreign Relations Of The United States, 1964–1968, Volume Xxix, Part 1, Korea*. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v29p1/d127>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.

Satu tahun berselang, pada tahun 1968, Tim Elit 31, Pasukan Komando Korut dikirim ke Korsel dengan misi infiltrasi *Blue House* (Kediaman Presiden Korea Selatan) dan membunuh Presiden Park Chung-hee.¹⁴ Pasukan Komando ini dilatih setidaknya selama 2 tahun di bawah kepemimpinan Kim Il Sung untuk misi membunuh Presiden Korsel yang mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer 7 tahun sebelumnya.¹⁵

Ketika bersembunyi di pegunungan di Seoul, mereka ditemukan oleh sekelompok masyarakat. Tim Elit 31 memutuskan untuk tidak membunuh mereka, setelah kelompok masyarakat itu diajarkan paham komunis, mereka dilepaskan kembali. Hal ini merupakan kesalahan besar. Masyarakat itu kemudian membocorkan informasi kepada tentara dan polisi Korsel. Pasukan Komando Korut sempat berhasil menghilangkan jejak. Mereka berhasil berkamufase menggunakan seragam tentara Korsel dan berpura-pura mencari pasukan Korut.¹⁶

Di *Checkpoint 100* diluar kediaman presiden, mereka diinterogasi dan pertempuran bersenjata pecah seketika. Beberapa Pasukan Komando berhasil lolos, namun kebanyakan kemudian dibunuh dan memutuskan bunuh diri dalam percobaan mereka kembali ke Korut. Satu orang berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam kejadian ini, misi mereka untuk membunuh Park Chung-hee gagal. Namun, lebih dari 90 orang tentara Korsel terbunuh, termasuk kelompok masyarakat di dalam 1 bus.¹⁷

Puncak permusuhan tidak hanya diantara dua negara Korea saja. Perilaku agresi khususnya Korea Utara juga berlaku untuk negara yang mendukung keberadaan Korea Selatan. Buktinya pada 23 Januari 1968, kapal intelejen Angkatan Laut Amerika Serikat, *Pueblo* diserang dan disandera oleh Korea Utara

¹⁴ _____. 2017. Timeline: North Korean Attacks. *BBC News* 1 April 2013. <https://www.bbc.com/news/10130248>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

¹⁵ Mac William Bishop. 2018. North Korean ex-assassin recalls 1968, when the Korean cold war ran hot. *CNBC News*. 26 Januari 2018. <https://www.nbcnews.com/news/north-korea/north-korean-ex-assassin-recalls-1968-year-mattered-most-n840511>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

¹⁶ _____. 2017. North Korea's History of Foreign Assassinations and Kidnappings. *BBC News* 14 Februari 2017. <https://www.bbc.com/news/world-asia-38974455>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

¹⁷ *Ibid.*

di laut Jepang. Pihak Korut mengklaim langkah tersebut diambil karena kapal *Pueblo* diduga kuat memasuki teritorial Korut untuk misi mata-mata.¹⁸

Seluruh data penting di atas kapal berhasil diamankan oleh tentara Korut. Setelah melalui 11 bulan negosiasi, Amerika Serikat berjanji untuk tidak akan melakukan segala jenis misi mata-mata di Korea Utara. Para tahanan dibebaskan pada 23 Desember 1968, namun kapal *Pueblo* tetap disandera Korea Utara hingga hari ini.¹⁹

Krisis hubungan dua Korea berubah drastis pada tahun 1970an. Pada saat itu pemerintahan Amerika Serikat dibawah Nixon membuat rancangan normalisasi hubungan dengan Cina, aliansi terdekat Korea Utara. Perubahan hubungan AS–Cina ini mengubah arsitektur keamanan di Asia Timur. Pemerintah Korut–Korsel memulai dialog antar pemerintah secara langsung. Pertemuan resmi kedua negara dimediasi oleh Palang Merah Internasional pada 4 Juli 1972. Agenda pertemuan ini adalah *Joint Statement on Reunification*. Namun *détente*²⁰ ini berumur singkat.²¹

Pada tahun 1974, Korut melakukan percobaan kedua pembunuhan Presiden Korsel, Park Chung-hee, oleh simpatisan Korut berkebangsaan Jepang. Percobaan percobaan pembunuhan ini kembali gagal. Namun Ibu Negara Korsel, Yuk Young-soo terbunuh dalam kejadian itu. Hal ini membuat ketegangan kembali meningkat diantara dua Korea. Selain itu, agen Korut juga melakukan percobaan pembunuhan terhadap suksesor Park Chung-hee, Presiden Chun Doo-hwan. Percobaan ini dilakukan saat perjalanan dinas Presiden Korsel ke Burma pada tahun 1983. Misi ini juga berujung pada kegagalan.²²

Meskipun mengalami peningkatan ketegangan, terdapat beberapa periode upaya perbaikan hubungan antar Korea pada akhir Perang Dingin. Misalnya pada

¹⁸ Mitchel B. Lerner. 2018. Remember the Pueblo!. *New York Times*. 23 Januari 2018. <https://www.nytimes.com/2018/01/23/opinion/pueblo-ship-vietnam-war.html>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

¹⁹ _____. 2018. Tensions With North Korea: The 1968 Pueblo Incident. *Roper*. 20 Februari 2018. <https://ropercenter.cornell.edu/blog/tensions-north-korea-1968-pueblo-incident>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

²⁰ Meriam Webster Dictionary: relaksasi hubungan tegang atau ketegangan (seperti antar negara).

²¹ Daniel Wertz. *Op.ci*. Hal. 2.

²² James A. Foley. 2003. “‘Sunshine’ or Showers for Korea’s Divided Families?” *World Affairs*. Vol. 165. No. 4. Hal. 182. Doi: 10.2307/20672668

tahun 1985, anggota keluarga yang terpisah diantara dua Korea diperbolehkan bertemu di Seoul atau Pyongyang. Namun situasi ini juga tak berlangsung lama. Pada tahun 1987, Korut melakukan pengeboman pada pesawat Korean Air Flight 858. Kejadian ini menggiring hubungan kedua negara ke dalam fase krisis.²³

Runtuhnya Tembok Berlin dan berlangsungnya *Malta Summit* antara Presiden Amerika Serikat, George Bush dan pemimimpin Soviet, Mikhail Gorbachev pada akhir tahun 1989 menandakan Perang Dingin akan segera berakhir. Menghadapi perubahan dramatis sejarah global ini, Korsel yang dipimpin oleh Roh Tae Woo (No T'aeu), berupaya untuk membawa perubahan dalam hubungan antar Korea.²⁴ Di bawah kepemimpinan Presiden Roh, hubungan diplomatik antar Korea berlangsung signifikan. Dinamika hubungan antar Korea pada periode ini hingga abad 21 akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

B. Hubungan Dua Korea Pasca Perang Dingin Hingga abad 21

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, era kepemimpinan Presiden Roh merupakan babak baru hubungan antar Korea di masa akhir Perang Dingin hingga setelahnya. Agar lebih sistematis, sub-bab ini akan dibagi menjadi 3 periodisasi, yakni, hubungan antar Korea di bawah pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1993), *Sunshine Policy* (1998-2008) serta masa pemerintahan Lee Myung Bak (2008-2012). Ketiga periodisasi ini merupakan periode yang paling signifikan di dalam dinamika hubungan dua Korea pasca Perang Dingin. Tanpa mengabaikan dinamika hubungan diluar ketiga periode ini, penulis akan menyisipkan *gap year* pada ketiga periode tersebut.

1. Hubungan Inter-Korea di Masa Pemerintahan Roh Tae Woo (1988-1993)

Pemerintahan Roh Tae Woo mengambil alih kekuasaan atas hasil *June Democration Movement* di Korsel pada tahun 1987. Atas latar belakang tersebut, Presiden Roh memiliki kecenderungan yang kuat membawa sistem demokratisasi

²³ *Ibid.*

²⁴ Kim Ji-hyung. 2012. "The Development of the Discussions on Unification during the Early Post-Cold War Era: Competition and Coexistence between the Government and Nongovernment Sector". *International Journal of Korean History*. Vol. 17. No. 1. Hal. 171. <https://ijkh.khistory.org/upload/pdf/17-1-6.pdf>. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.

ke dalam sistem pemerintahannya. Di awal pemerintahannya, banyak desakan dari kalangan elit politik Korsel untuk melakukan unifikasi dengan Korut dengan cara perdagangan lintas Korea di level masyarakat. Selain itu banyak muncul gerakan pro-unifikasi di kalangan mahasiswa yang menciptakan semangat unifikasi di kalangan masyarakat.²⁵

Menanggapi hal tersebut pemerintahan Roh segera mencairkan pendidikan anti-komunis dan mulai mempromosikan pendidikan persatuan di sekolah-sekolah. Menghadapi tekanan dari kalangan “Kiri” yang mendesak unifikasi, rezim Roh mulai menyusun kebijakan bertahap menuju normalisasi hubungan antar Korea.²⁶ Pada tanggal 7 Juli 1988, pemerintahan Roh Tae Woo secara resmi mengumumkan kebijakannya untuk Korut yang bernama *Nordpolitik Policy*. Peristiwa ini sebagai *July 7th Declaration (Special Declaration for National Self-Esteem, Unification, and Prosperity)*.²⁷

Secara umum, Presiden Roh melalui *Nordpolitik* mendeklarasikan sedikitnya 6 proposal, yakni:²⁸

1. Kerjasama aktif diantara 2 Korea dan pencabutan pembatasan perjalanan (*travel restriction*).
2. Pertukaran surat dan kunjungan bagi keluarga yang terpisah.
3. Deklarasi perluasan kerjasama perdagangan antara Korsel dan Korut.
4. Menyeimbangkan, mengembangkan dan meningkatkan perdagangan barang non-militer dengan lebih banyak negara.
5. Kerjasama luar negeri untuk kebaikan bangsa.
6. Membantu Korut dalam membangun hubungan dengan negara-negara kapitalis (Blok Barat) dan Korsel berupaya untuk membangun hubungan dengan negara sosialis (Blok Timur).

²⁵ *Ibid.* Hal. 172.

²⁶ Grażyna Strnad. 2010. “The Sixth Republic Under Roh Tae Woo : The Genesis Of South Korean Democracy”. *Polish Political Science*. Vol. 39. No. 1. Hal. 219. <https://marszalek.com.pl/yearbook/docs/39/ppsy2010011.pdf>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

²⁷ Faizah Nadhiva, dkk. 2019. “Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi”. *Global Strategis*. Vol. 13. No. 2. Hal. 154. <https://e-journal.unair.ac.id/JGS/article/download/14977/8694>. Diunduh pada tanggal 12 Juni 2021.

²⁸ Grażyna Strnad. *Op. Cit.* Hal. 220.

Secara keseluruhan, kebijakan *Nordpolitik* Presiden Roh menginisiasi pembentukan hubungan diplomatik Korsel aliansi tradisional Korut, yakni Uni Soviet dan Cina. Sebagai bagian dari kebijakan ini, Pemerintahan Roh juga membuka komunikasi diplomatik dengan Korut. Untuk pertama kalinya, pada tahun 1989, Korsel membuka hubungan dagang dengan Korut dan memulai pertukaran olahraga.²⁹

Kebijakan *Nordpolitik* ini tak berselang lama dengan Olimpiade Seoul 1988. Pemerintahan Roh yakin bahwa keikutsertaan negara dalam permainan olahraga akan menghilangkan perpisahan Barat–Timur, dan menghasilkan era baru rekonsiliasi dan kerjasama internasional.³⁰

Kebijakan ini mengisyaratkan kepada masyarakat internasional bahwa Korsel tak lagi memandang Korut sebagai lawan. Meski demikian, analis militer Korsel dan Amerika Serikat tetap mewaspadaikan pembangunan kekuatan perang konvensional dan senjata inkonvensional di Korea Utara yang dikembangkan sejak tahun 1970an.³¹ Lebih spesifik, kebijakan ini membuat tekanan kepada Korut untuk melanjutkan dialog dengan Korsel. Hasilnya, pada tahun 1991, kedua negara menandatangani Pakta Rekonsiliasi dan Non-Agresi di antara 2 Korea.³²

Setahun berselang, Perdana Menteri Korsel, Chung Won-shik dan Dewan Administrasi (*Premier of the Administration Council*) Korut, Yon Hyong-muk menandatangani *Joint Declaration on the Denuclearization of the Korean Peninsula*. Perjanjian yang ditandatangani pada 20 Januari 1992 ini berisi poin-poin kesepakatan diantaranya, berjanji untuk tidak memiliki, memproduksi, atau menggunakan senjata nuklir dan melarang pengembangan uranium dan pemrosesan ulang plutonium.³³

²⁹ Daniel Wertz. *Loc. Cit.*

³⁰ Mangil Kang. 2019. *A History of Contemporary Korea*. Leiden: Brill. Hal. 107-108.

³¹ Taik-young Hamm. 1999. *Arming the Two Koreas, State, Capital and Military Power*. London dan New York: Routledge. Hal. 79-80.

³² Carl. J. Saxer. 2002. *From Transition to Power Alternation, Democracy in South Korea 1987-1997*. New York dan London: Routledge. Hal. 124.

³³ *Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KR%20KP_920120_JointDeclarationDenuclearizationKoreanPeninsula.pdf. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.

Secara eksplisit, kebijakan *Nordpolitik* merupakan tonggak sejarah hubungan Korsel–Korut. Sangat jelas terlihat di penjelasan sebelumnya bahwa kebijakan ini berhasil mengundang Korut untuk hadir di dalam meja perundingan. Perumusan formula reunifikasi juga dimulai dengan langkah kecil (*confidence-building steps*), terlihat realistis dalam membangun komunikasi dengan Korut. Langkah strategis yang ditempuh adalah mengupayakan koeksistensi dan kemakmuran bersama (membangun proyek ekonomi dan integrasi perlahan) sebagai tahap dari unifikasi.

Sayangnya, pengganti Presiden Roh, Kim Young Sam (1933-1998) kembali membawa hubungan antar Korea ke dalam krisis. Di awal pemerintahannya, Kim Young Sam bersikap keras (*hardline*³⁴) terhadap ancaman Korut untuk keluar dari Perjanjian Nulki.³⁵

Kim Young Sam mengubah sikap kerasnya pada tahun 1994. Ia kemudian memperkenalkan formula unifikasi yang baru, yakni *Korean National Community Unification Formula*. Pada dasarnya, formula ini sama dengan formula yang diperkenalkan oleh Presiden Roh. Pada prinsipnya, proses unifikasi akan tercapai dalam 3 langkah. Pertama, masing-masing Korea akan mengakui kedaulatan 1 sama lain dan meningkatkan perdagangan dan kerjasama. Kedua, membentuk *South-North Union* yang dijalankan oleh sistem dua negara. Tahap terakhir adalah unifikasi, dimana konstitusi dan pemerintahan tunggal akan dibentuk.³⁶

Dalam menerapkan strategi ini, Presiden Kim Young Sam mengagendakan pertemuan dengan Presiden Korut, Kim Il Sung pada tanggal 25-27 Juli 1994. Sayangnya, Kim Il Sung meninggal pada tanggal 8 Juli 1994 sebelum agenda pertemuan tersebut dilaksanakan. Ketegangan meningkat ketika Korut memprotes

³⁴ Merriam Webster Dictionary: *advocating or involving a rigidly uncompromising course of action* (menganjurkan atau melibatkan tindakan yang kaku tanpa kompromi). Merriam Webster Dictionary. *Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KR%20KP_920120_JointDeclarationDenuclearizationKoreanPeninsula.pdf. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.

³⁵ _____. 2017. A New Dawn in Inter-Korean Relations. *Reuters Graphic*. 21 Juli 2017. <http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/INTERKOREA-RELATIONS/010041MD3JB/index.html>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

³⁶ Dylan Stent. 2020. Moon's Plan for Inter-Korean Relations is Actually 40 Years Old. *The Diplomat*. 23 Oktober 2020. <https://thediplomat.com/2020/10/moons-plan-for-inter-korean-relations-is-actually-40-years-old/>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

Korsel yang tidak mengirimkan pesan duka (*condolance message*) kepada Kim Il Sung. Hal ini merupakan awal dari pembatalan pertemuan yang telah diagendakan.³⁷ Hubungan Korsel–Korut mengalami naik turun dalam beberapa tahun setelahnya, termasuk bantuan makanan, serangan kapal selam Korut, dan diplomasi regional.³⁸

Pada tahun 1995, nilai perdagangan antar Korea adalah sebesar \$280 juta. Angka ini merupakan akumulasi 2,2 persen volume total perdagangan Pyongyang. Import terbesar Korut dari Korsel adalah mineral, agrikultur, dan barang-barang perikanan. Investasi Seoul di Korut juga dibatasi. Perusahaan Korsel hanya membawa bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan modal ke Korut dan mengimpornya kembali ke Korsel.³⁹

2. Hubungan Inter-Korea Dibawah Kebijakan *Sunshine Policy* (1998-2008)

“*Sunshine Policy*” adalah kebijakan *Confidence Building Measures* (CBMs) dalam hubungan dua Korea yang diperkenalkan oleh Presiden Kim Dae Jung pada tahun 1998 dan dilanjutkan oleh presiden Roh Moo Hyun pada tahun 2003 hingga 2008 tahun. CBMs ini merupakan langkah awal dari program reunifikasi yang direncanakan. Secara umum, kebijakan CBMs bertujuan untuk meningkatkan interaksi dan kerjasama dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, sosial dan keamanan untuk menciptakan stabilitas dalam hubungan antar-Korea.⁴⁰

Dalam pidato pelantikannya pada tanggal 25 Februari 1998, Presiden Kim Dae Jung mengumumkan bahwa pemerintahannya akan memfasilitasi perdagangan dan kerjasama dengan dunia luar. Dalam kaitannya dengan Korea Utara, secara

³⁷ Daniel Wertz. *Op. Cit.* Hal. 2.

³⁸ Yongko Kim. 2008. “Inconsistency or Flexibility? The Kim Young Sam Government’s North Korea Policy and Its Domestic Variants”. *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal. 230.

<https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?sereArticleSearchBean.tjId=ART001368626>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2021.

³⁹ Lee Sangkeun & Moon Chung-in. 2016. “South Korea’s Economic Engagement toward North Korea”. *Joint U.S.-Korea Academic Studies*. Hal. 227. https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/joint_us-korea_2016_-_sk_econ_engagment.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

⁴⁰ Bayu Eko Yulianto. 2021. “Sunshine Policy: Kebuntuan Confidence Building Measures Semenanjung Korea pada masa Kim Dae Jung-Roh Moo Hyun”. *Jurnal Dinamika Global*. Vol. 6. No. 1. Hal. 2. <https://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dinamika-global/article/view/372/246>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2021.

teknis, program-program CBMs yang dicanangkan oleh pemerintahannya adalah berupa bantuan makanan, mempromosikan kerjasama ekonomi, sosial dan budaya.⁴¹ Objektifitas *Sunshine Policy* sangat jelas, yakni membangun pondasi unifikasi damai dengan Korut dengan menghentikan reaksi negatif dan tindakan permusuhan melalui hidup berdampingan secara damai, perdagangan dan kerjasama.⁴²

Pada dasarnya *Sunshine Policy* memiliki 3 prinsip dasar. Pertama, prinsip non-toleransi terhadap ancaman militer atau provokasi bersenjata oleh Korut, kedua, menghilangkan perspektif unifikasi yang melemahkan atau mengancam Korut, dan ketiga adalah promosi perdagangan dan kerjasama melalui pemberlakuan kembali *1991 Basic Agreement on Reconciliation, Non-aggression, Exchanges, and Cooperation*.⁴³

Dalam praktiknya, pemerintah Korsel mengizinkan Organisasi Non-Pemerintah (NGO), pelaku bisnis, dan masyarakat umum untuk melakukan kontak melewati DMZ dan meningkatkan bantuan pangan dan bahan pertanian seperti pupuk ke Korut. Pada tahun 1998, anak perusahaan Hyundai Group mulai beroperasi di Gunung Geumgang di Korut.⁴⁴ Pada 13-15 Juni 2000, Kim Dae Jung dan Kim Jong Il bertemu di Pyongyang (Gambar 2.1 di halaman selanjutnya). *Inter-Korean Summit* ini merupakan pertemuan bersejarah karena merupakan yang pertama setelah pemisahan Korea. Hal tersebut menyebabkan perubahan kebijakan yang dramatis di antara 2 Korea.⁴⁵

⁴¹ Naskah Lengkap Pidato Pelantikan Presiden Kim Dae Jung 25 Februari 1998 (김대중 대통령 취임사 전문(全文 *Kim Dae-jung Daetongryeong chui-imsa jeonmun*)). *Korea Policy Briefing* 26 Februari 1998. <https://www.korea.kr/archive/governmentView.do?newsId=148741323>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2021.

⁴² Lee Sangkeun & Moon Chung-in. *Loc. Cit.*

⁴³ Naskah Lengkap Pidato Pelantikan Presiden Kim Dae Jung 25 Februari 1998, *Ibid.*

⁴⁴ Yongho Kim. 1999. "Inconsistency or Flexibility? The Kim Young Sam Government's North Korea Policy and Its Domestic Variants". *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 8, No. 1. Hal. 235.

⁴⁵ _____. 10 November 2009. "Mount Kumgang and Inter-Korean Relations". *NCHK Issue Brief*. <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/mt.-kumgang-and-inter-korean-relations>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

Gambar 2.1

Inter-Korean Summit Tahun 2000

Sumber: Kim Tong-Hyung. 2018. "A look at significant meetings between the Koreas". *AP News*. 6 Maret 2018. <https://apnews.com/article/ef8eba9f077b4278b0ca4306771dedbf>. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.

Di hari terakhir *Inter-Korean Summit* ini, kedua pemimpin menandatangani deklarasi yang berisi komitmen untuk mempromosikan rekonsiliasi, kerjasama, dan reunifikasi di Semenanjung Korea. Secara khusus, deklarasi tersebut mengandung 5 poin, yakni:⁴⁶

1. Kesepakatan untuk menyelesaikan isu reunifikasi secara independen dari pengaruh eksternal.
2. Kedua Korea sepakat membuat proposal untuk penciptaan federasi dan konfederasi Korea.
3. Kesepakatan untuk menyelesaikan masalah keluarga lama dan kerabat yang terpisah sedini mungkin sebelum *National Liberation Day* pada tanggal 15 Agustus 2000.

⁴⁶ Andrew O'Neil. 2001. "The 2000 Inter-Korean Summit: The Road to Reconsolation?" *Australian Journal of International Affairs*. Vol. 55. No. 1. Hal. 59. Doi: 10.1080/10357710120055076

4. Kesepakatan untuk mengembangkan hubungan ekonomi yang lebih dekat dan menguatkan *mutual confidence* melalui kerjasama dan perdagangan di semua bidang.
5. Kesepakatan untuk mengadakan pertemuan lanjutan segera untuk mengimplementasikan 4 poin sebelumnya.

Tertundanya perjanjian diatas sedikit banyaknya dipengaruhi oleh faktor luar. Pada tahun 2001, Presiden George W. Bush menjabat di Amerika Serikat. Di bawah pemerintahannya, ia mengkategorikan Korut, Iraq dan Iran sebagai “*axis of evil*” dan menjatuhkan sanksi baru. Pada April 2002, Bush menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak akan mengesahkan kepatuhan Korea Utara terhadap Kerangka Kerja yang disetujui tahun 1994.⁴⁷ Pada tahun 2003, Korut menyatakan keluar dari NPT dan memulai lagi operasi fasilitas nuklirnya.⁴⁸ Hal tersebut tentu kontraproduktif dengan rekonsiliasi yang sudah dibangun oleh pemimpin kedua Korea.

Roh Moo Hyun yang menggantikan Kim Dae Jung pada tahun 2003-2008 melanjutkan upaya rekonsiliasi yang intensif dengan Korut. Kebijakan *Sunshine Policy* diperbarui dengan kebijakan “*Policy for Peace and Prosperity*”. Kebijakan ini meningkatkan bantuan bilateral dan bantuan kemanusiaan untuk Korut.⁴⁹ Perbandingan di masa pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Mon Hyun dapat dilihat di Tabel 2.1.

⁴⁷ _____. *Nd.* “North Korean Nuclear Negotiations 1985-2019”. *Cfr.* <https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>. Diakses pada tanggal 16 Juni 2021.

⁴⁸ Kelsey Davenport. Juli 2020. “Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy”. *Arms Control Association*. <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

⁴⁹ Daniel Wertz. *Op. Cit.* Hal. 3.

Tabel 2.1

Bantuan Korsel untuk Korut di Masa Pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun (Juta Won)

Jenis Tahun	Govt. Assistance & Grants	Govt. Food And Loans	Private Assistance & Grants	Total
1997	24,0	0	18,2	42,2
1998	15,4	0	27,5	42,9
1999	33,9	0	22,3	56,2
2000	97,8	105,7	38,7	242
2001	97,5	0	78,2	175,7
2002	114,0	151,0	57,6	322,6
2003	109,7	151,0	76,6	337,3
2004	131,3	135,9	155,8	423,0
2005	136,0	178,7	77,9	382,6
2006	227,3	0	70,9	298,2
2007	198,3	250,5	90,9	439,7
2008	43,8	0	72,5	116,3

Sumber: Lee Sangkeun & Moon Chung-in. 2016. "South Korea's Economic Engagement toward North Korea". *Joint U.S.-Korea Academic Studies*. Hal. 230. <https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/joint-us-korea-2016-sk-econ-engagment.pdf>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

Dari Tabel 2.1 diatas dapat dicermati bahwa bantuan Korsel untuk Korut mengalami naik turun selama 1 dekade. Secara keseluruhan bantuan terbesar Korsel untuk Korut dilakukan dibawah pemerintahan Roh Moo Hyun pada tahun 2007, yakni sebesar 437 Juta Won. Jika dikategorikan berdasarkan jenis bantuan, *Government Assistance & Grants* terbesar diberikan pada tahun 2006, yakni sebesar 227,3 Juta Won. Di samping itu, bantuan jenis *Government Food And Loans* terbesar pada tahun 2007 yakni sebesar 250,5 Juta Won. Bentuk *Private Assistance & Grants* terbesar pada tahun 2004, yakni 155 Juta Won.

Selain dalam bentuk bantuan, sejak pemerintahan Kim Dae Jung, sektor perdagangan antar Korea juga mengalami peningkatan yang dinamis sejak dilakukan *Inter-Korean Summit* pada tahun 2000. Perbandingan data perdagangan dua Korea di masa pemerintahan Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun dapat dilihat di Tabel 2.2.

Tabel 2.2
 Nilai Perdagangan Inter-Korea Pasca Perang Dingin Hingga Pemerintahan
 Roh Moo Hyun (Juta \$ Dollar)

Jenis	Komersial		Non-Komersial	Total
	<i>General Trade & Processing-commission Trade</i>	<i>Joint Economic Cooperation projects</i>	<i>Gov't and nongov't assistance and goods and services related to social and cultural exchanges</i>	
1989-2000	2.034	120	373	2.527
2001	236	19	148	403
2002	343	25	273	642
2003	409	21	294	724
2004	347	89	261	697
2005	409	270	366	1.056
2006	557	371	422	1.350
2007	790	640	367	1.798
2008	808	904	108	1.820
2009	666	976	37	1.697

Sumber: Lee Sangkeun & Moon Chung-in. 2016. "South Korea's Economic Engagement toward North Korea". *Joint U.S.-Korea Academic Studies*. Hal. 229. https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/joint_us-korea_2016_-_sk_econ_engagment.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

Dari Tabel 2.2 dapat dilihat bahwa sejak dilakukannya *Inter-Korean Summit* pada tahun 2000, nilai perdagangan antar Korea mengalami peningkatan yang signifikan, walaupun di dalam perjalanannya mengalami naik turun. Dekade 1989-2000, nilai perdagangan antar Korea hanya 2 milyar Dollar dibandingkan pada tahun 2008 dibawah pemerintahan Roh Moo Hyun sendiri bernilai 1,8 Milyar Dollar.

Secara politis, di akhir jabatannya, pada 2-4 Oktober 2007, Roh Moo Hyun melakukan pertemuan dengan Kim Jong Il. Dalam pertemuan ini dihasilkan sebuah perjanjian *Declaration on the Advancement of South-North Korean Relations, Peace and Prosperity*, yang mana di dalamnya memuat tentang berbagai masalah yang terkait dengan mewujudkan kemajuan hubungan Seoul-Pyongyang,

perdamaian di Semenanjung Korea, kemakmuran rakyat Korea dan penyatuan Korea.⁵⁰ Sayangnya, pemimpin Korsel selanjutnya tidak ada yang melakukan tindak lanjut atas implimentasi perjanjian ini.

3. Hubungan Inter-Korea Dibawah Presiden Lee Myung Bak (2008-2012)

Lee Myung Bak merupakan presiden Korsel yang kebijakannya terhadap Korut menimbulkan kontroversi besar. Beberapa sumber mengatakan kebijakannya memiliki efek positif pada negara yang paling terisolasi di dunia itu, sementara yang lain mengklain hubungan antar Korea mengalami stagnasi di bawah pemerintahannya.⁵¹

Pemerintahan Lee ramah terhadap bisnis dan menerapkan kebijakan ekonomi liberal. Dalam hal ini, Lee mengurangi peran pemerintah dalam sektor ekonomi dan membuka pasar bebas seperti yang diamanatkan *Foreign Trade Agreement* antara Amerika Serikat dan Korsel. Dalam kaitannya dengan Korea Utara, Presiden Lee menunjukkan sifat pragmatisme, produktivitas, dan hasil nyata, daripada mengejar agenda ideologis.⁵²

Kebijakan pemerintah Korsel dibawah kepemimpinan Lee pada dasarnya memiliki beberapa kemiripan dengan kebijakan Korsel yang sebelumnya, yakni mengagendakan unifikasi seperti yang sudah dirancang sejak pemerintahan Kim Young Sam. Pemerintahan Lee juga mempromosikan kerjasama, mencari konsesi damai di Semenanjung Korea, dan membangun dasar untuk persatuan yang damai.⁵³

Meskipun perdagangan ekonomi dan kegiatan sosial lintas batas mengalami peningkatan dan perkembangan (Tabel 2.3 di halaman selanjutnya), hal ini tidak berpengaruh pada pelembagaan hubungan antar-Korea. Dialog antar-Korea tidak

⁵⁰ Declaration on the Advancement of South-North Korean Relations, Peace and Prosperity. https://www.ncnk.org/sites/default/files/2007_North-South_%20Declaration.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

⁵¹ Tae-jun Kang. "Lee Myung-bak: North Korea Sought Inter-Korea Summit Meeting 5 Times". *The Diplomat*. 30 Januari 2015. <https://thediplomat.com/2015/01/lee-myung-bak-north-korea-sought-inter-korea-summit-meeting-5-times>. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2021.

⁵² Bruce Klingner. 2008. "New South Korean President Bring Conservative Policy Change. *Backgrounder*. 2120. Hal.4. <http://research.policyarchive.org/13482.pdf>. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2021.

⁵³ Jong Chul Park. 2008. "Lee Myun Bak Administration's North Korea Policy: Challenges and Tasks" *The Journal Of East Asian Affairs*. Vol. 22. No. 2. Hal. 41.

ada sama sekali dan hanya muncul sesekali atas permintaan Korut.⁵⁴ Di dalam autobiografi Lee Myung Bak yang berjudul *Time as President*, Lee dalam catatannya menyatakan Korut setidaknya meminta diadakannya *Inter-Korean Summit* sebanyak 5 kali. Tetapi Korsel selalu menolak karena selalu ada prasyarat (*preconditions*) untuk mengadakan pembicaraan.⁵⁵

Tabel 2.3

Nilai Perdagangan Inter-Korea di Masa Pemerintahan Lee Myung Bak
(Juta \$)

Type Tahun	Commercial Trade		Non- Commercial Transactions	Total
	General Trade & Processing- oncommission Trade	Economic Cooperation		
2007	790	640	367	1.779
2008	808	904	108	1.820
2009	666	976	37	1.679
2010	435	1.454	23	1.912
2011	4	1.698	12	1.714
2012	1	1.961	9	1.971

Sumber: Lee Sangkeun & Moon Chung-in. 2016. "South Korea's Economic Engagement toward North Korea". *Joint U.S.-Korea Academic Studies*. Hal. 234. <https://keia.org/wp-content/uploads/2020/05/joint-us-korea-2016-sk-econ-engagment.pdf>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.

Dari Tabel 2.3 dapat dilihat bahwa nilai perdagangan antar Korea cenderung mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, Jika dibandingkan pada tahun 2008 dibawah pemerintahan Roh Moo Hyun sendiri bernilai 1,8 Milyar Dollar (Tabel 2.2), pemerintahan Lee Myung Bak pada tahun 2012 mampu membukukan nilai perdagangan hingga 1,97 Milyar \$ (Tabel 2.3). Namun seperti yang telah disinggung sebelumnya, hal ini tidak berimplikasi terhadap unifikasi Semenanjung Korea sebagai tujuan awal.

Selain sikap pragmatis Lee Myung Bak, setidaknya terdapat 2 insiden besar yang kontraproduktif terhadap perbaikan hubungan antar-Korea di masa pemerintahannya. Pertama, penembakan atas turis perempuan Korsel di zona

⁵⁴ Jong Chul Park. *Ibid.* Hal. 40.

⁵⁵ Tae Jun Kang. *Ibid.*

militer terbatas di daerah Gunung Geumgang pada tanggal 11 Juli 2008. Kedua adalah insiden tenggelamnya kapal Angkatan Laut Cheonan pada Maret 2010. Dimana hasil investigasi menunjukkan bahwa kapal tersebut ditorpedo oleh kapal Selam Korut.⁵⁶ Hal-hal tersebut merupakan indikasi yang kuat bahwa Korsel dibawah pemerintahan Lee Myung Bak gagal dalam upaya normalisasi hubungan dengan Korut.

C. Kebijakan *Trust-Political Policy* Park Geun Hye

Seperti yang telah dijabarkan pada bab sebelumnya, Park Geun Hye merupakan presiden ke-11. Ia merupakan presiden perempuan pertama di Korea Selatan. Pada 25 Februari 2013, Park diresmikan menjadi Presiden Korea Selatan. Di dalam pidato pelantikannya, Park menyatakan komitmen untuk melakukan hubungan damai dengan Korea Utara melalui *Trust-Building Process* yang kemudian dikenal dengan *Trust-Political Policy* (*Trust-Politik*).⁵⁷

“Through a trust-building process on the Korean peninsula, I intend to lay the groundwork for an era of harmonious unification where all Koreans can lead prosperous and freer lives and where their dreams can come true. I will move forward step-by-step on the basis of credible deterrence to build trust between the South and the North. Trust can be built through dialogue and honoring promises that have already been made. It is my hope that North Korea will abide by international norms and make the right choice so that the trust-building process on the Korean peninsula can move forward.”

Secara konseptual, kebijakan *Trust-Political Policy* merupakan upaya proses membangun kepercayaan (*Trust-building process*) di Semenanjung Korea dengan tujuan menjaga perdamaian. Dalam hal ini, pemerintahan Park Geun Hye menyatakan tidak akan mentolerir segala bentuk provokasi yang dilakukan oleh Korea Utara, serta membangun kepercayaan dengan Korea Utara untuk mencapai perdamaian abadi.⁵⁸

⁵⁶ Lee Sangkeun & Moon Chung-in. *Op. Cit.* Hal. 235.

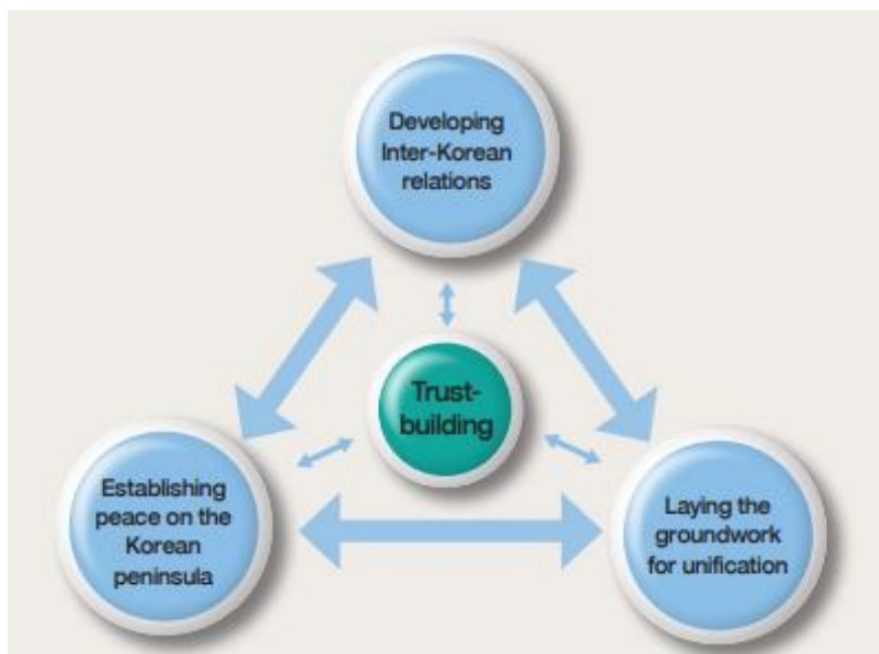
⁵⁷ President Park Geun-Hye's inauguration speech. 26 Februari 2013. https://overseas.mofa.go.kr/fj-en/brd/m_3229/view.do?seq=691211&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=∓multi itm_seq=0&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&company_cd=&company_nm=&page=28. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2021.

⁵⁸ Ministry of Unification. 2013. *Trust-Building Process on the Korean Peninsula*. Hal. 6. https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_process.pdf. Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2021.

Strategi kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* di bawah pemerintahan Park Geun Hye dapat digambarkan seperti gambar 2.2. Dari gambar tersebut dapat dicermati bahwa melalui *Trust-Political Policy*, pemerintah Korea Selatan di bawah Park Geun Hye mempromosikan kebijakan yang menghasilkan siklus yang baik yang terdiri dari membangun kepercayaan (*Trust-building*), mengembangkan hubungan antar Korea (*Developing Inter-Korean Relations*), membangun perdamaian di Semenanjung Korea (*Establishing peace on the Korean Peninsula*) serta menetapkan landasan unifikasi (*laying the groundwork for unification*).

Gambar 2.2

Strategi *Trust-Political Policy* di Masa Pemerintahan Park Geun Hye



Sumber: Ministry of Unification. 2013. Trust-Building Process on the Korean Peninsula. Hal. 6. [https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_p rocess.pdf](https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_building_process.pdf). Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2021.

Seperti *Chinese Dream* dalam kebijakan luar negeri Cina dibawah pemerintahan Xi Jinping, *Trust-political policy* Park Geun Hye ditujukan untuk banyak audiens. Secara garis besar, Park telah mengedepankan visi trust-politik Korea, regional, dan global, dengan benang merah mereka menjadi fokus yang

lebih besar pada orang-orang biasa dan masyarakat sipil.⁵⁹ Secara garis besar, Kebijakan *Trust-Political Policy* ini memiliki 3 visi utama, yakni:⁶⁰

- a. Kepercayaan antara Korea Selatan dan Korea Utara;
- b. Kepercayaan publik (*public confidence*) di dalam pemerintahan Korea Selatan;
- c. Kepercayaan dari masyarakat internasional.

Dalam menguraikan visinya tentang *Trust-Political Policy*, Presiden Park menyerukan adopsi dua standar: pertama, Korea Utara harus menjaga perjanjian yang dibuat dengan Korea Selatan dan komunitas internasional untuk membangun tingkat kepercayaan minimum. Kedua, harus ada konsekuensi yang pasti untuk tindakan yang melanggar perdamaian. Oleh karena itu, visi Presiden Park untuk *Trust-Political Policy* didukung oleh kebijakan 'penyelarasan' (*alignment*) yang fleksibel yang terbuka untuk negosiasi di waktu lain. Jadi, meskipun menggarisbawahi penolakannya untuk lebih jauh menoleransi perilaku provokatif Korea Utara, Park juga menganjurkan kesediaannya untuk menawarkan babak baru kepada Pyongyang.⁶¹

Dalam pidato tahun barunya pada Januari 2014, Presiden Park menyebut prospek penyatuan Korea sebagai Daebak (*jackpot*). Tampak jelas bahwa Park Geun Hye terinspirasi oleh pengalaman reunifikasi Jerman setelah berakhirnya Perang Dingin. Pada tanggal 28 Maret 2014, di kota Dresden di bekas Jerman Timur, Park mengusulkan Inisiatif Dresden. Inisiatif ini menggabungkan berbagai dimensi kemanusiaan, ekonomi dan lainnya untuk membantu dalam rehabilitasi bertahap Korea Utara. Ini mencakup bantuan kemanusiaan, proyek-proyek ekonomi kolaboratif antara kedua Korea, Rusia dan Cina, dan pendirian 'Taman Eko Perdamaian Dunia' di sepanjang Zona Demiliterisasi (DMZ) Semenanjung Korea sebagai koridor untuk rekonsiliasi antara kedua Korea. Tidak ada kebetulan dalam keputusan Presiden Park untuk mengunjungi Dresden, yang dihancurkan oleh pemboman selama Perang Dunia Kedua dan berada di bawah kendali negara

⁵⁹ Zachary Keck. 9 Mei 2013. "The Three Faces of Park's "Trustpolitik"". *The Diplomat*. <https://thediplomat.com/2013/05/the-three-faces-of-parks-trustpolitik/>. Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2021.

⁶⁰ Ministry of Unification. *Op. Cit.* . Hal. 5.

⁶¹ Geetha Govindasam. 2019. "Failure of an Inter-Korean Policy: The Case of Trust politik". *International Journal of East Asian Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal. 2.

komunis Jerman Timur. Namun, pembangunan kembali Dresden berikutnya sebagai pusat budaya dan industri memungkinkan kota ini muncul sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di bekas Jerman Timur, oleh karena itu merupakan simbol penting perdamaian dan rekonsiliasi yang menopang negara–bangsa yang bersatu.⁶²

Sayangnya, perkembangan di Semenanjung Korea sejak tahun 2012 memberikan tantangan yang signifikan bagi Korea Selatan di bawah Presiden Park Geun Hye dalam menyikapi perilaku rezim Pyongyang yang semakin tidak menentu sejak suksesi Kim Jong Un sebagai Pemimpin Tertinggi Korea Utara pada tahun 2011. Sejak suksesi tersebut, pemimpin baru Korea Utara melakukan banyak uji coba rudal dan nuklir pada tahun 2013 dan 2016. Serangkaian tindakan sebelumnya disertai dengan penutupan sementara Kompleks Industri Kaesong (KIC); sebagai tanggapan atas provokasi Korea Utara. Presiden Park tanpa batas waktu menanggukkan keterlibatan Korea Selatan lebih lanjut di KIC. Mengingat bahwa perkembangan ini disertai dengan tingkat retorika yang belum pernah terjadi sebelumnya serta penghinaan pribadi terhadap Presiden Park, ada kekhawatiran bahwa ketegangan yang dihasilkan menandai bahaya Perang Korea kedua. Hal tersebut dinilai banyak akademisi sebagai kegagalan Presiden Park Geun Hye dalam menerapkan kebijakan *trust-political policy* dalam upayanya melakukan normalisasi hubungan antar-Korea. Faktor-faktor kegagalan ini yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

⁶² *Ibid.* Hal. 5.

BAB III

KEGAGALAN *TRUST-POLITICAL POLICY* KOREA SELATAN DI MASA PEMERINTAHAN PARK GEUN HYE

Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, *Trust-Political Policy* gagal menghasilkan sesuatu yang signifikan di dalam peningkatan hubungan antar-Korea karena tindakan provokatif Korut yang terus berlanjut serta perkembangan politik domestik Korsel. Salah satu indikasi kelemahan *Trust-Political Policy* adalah fakta bahwa Presiden Park sendiri gagal mengaktualisasikan dengan jelas rencana-rencana kebijakan luar negerinya terhadap Korut. Untuk memudahkan pemahaman, bab ini akan dibagi menjadi 2 bagian, yakni faktor domestik dan faktor internasional yang menyebabkan kegagalan *Trust-Political Policy* di bawah pemerintahan Park Geun Hye.

A. Faktor Domestik

1. Kekalahan Partai Saenuri dan Instabilitas Politik Domestik Korsel

Salah satu faktor yang memperumit implementasi kebijakan *Trust-Political Policy* Korsel terhadap Korut adalah perselisihan antar-partai yang meningkat di Korsel pada awal tahun 2016. Partai konservatif yang berkuasa, Partai Saenuri gagal memenangkan mayoritas perwakilan parlemen di Pemilu. Hal ini membuka jalan bagi sistem politik tripartit kembali berlaku di Korsel dalam 20 tahun. Hasil mengejutkan ini lahir setelah Korsel berbulan-bulan larut dalam perselisihan politik yang besar dalam hal penggambaran ulang peta elektoral, kelambanan legislatif, serta perselisihan para calon. Situasi ini mendorong pemilih muda mencari alternatif pilihan selain partai Saenuri.¹

Dalam Pemilu ini, Partai Saenuri hanya memenangkan 122 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan total sebanyak 300 orang. Partai pengusung Park

¹ Bae Hyun-jung. 3 April 2016. "Saenuri Party Loses Assembly Majority". *The Korea Herald*. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160413000611>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.

Geun Hye ini kalah dari partai oposisi utama, Partai Minjoo Korea yang memenangkan 123 suara, sedangkan Partai Rakyat (*The People's party*) memperoleh 38 kursi. Performa mengecewakan dari Partai Saenuri ini juga mengguncang stabilitas pemerintahan presiden Park Geun Hye.² Dengan kata lain karena mayoritas kursi parlemen tidak diisi oleh partai pengusung Park Geun Hye, distribusi kekuasaan Park Geun Hye tidak berjalan dengan efektif.

Dalam kaitannya dengan Korut, setelah uji coba nuklir Korut pada Februari 2016, Park Geun Hye secara tegas menolak perundingan lebih lanjut dengan Pyongyang. Sebaliknya, Presiden Park ingin menjatuhkan sanksi yang lebih keras untuk meruntuhkan rezim Korut. Kebijakan ini gagal diterapkan karena kekalahan elektoral Partai Saenuri di Parlemen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pergeseran kekuasaan partai liberal di dalam majelis legislatif Korsel menandakan kebuntuan kebijakan Park Geun Hye yang bercorak konservatif.³

Kaum liberal Korsel yang menduduki posisi strategis di pemerintahan juga mulai mengkritik *Trust-Political Policy* Park Geun Hye. Tokoh Partai Minjoo seperti Moon Jae-in menyatakan komitmennya untuk keterlibatan proaktif Korsel dengan Korut melalui mekanisme negosiasi, bukan penjatuhan sanksi. Lebih lanjut, Moon mendesak pencabutan sanksi 24 Mei yang dijatuhkan Park Geun Hye karena uji coba nuklir oleh rezim Pyongyang. Demikian pula Ahn Cheol-soom dari Partai Rakyat dalam peringatan 15 tahun KTT Presiden Inter-Korea menyerukan pemulihan hubungan ekonomi dan politik dengan Pyongyang.⁴

Pergeseran kekuasaan partai liberal ini, diperumit oleh fakta bahwa publik Korsel sangat membenci Korut atas tindakan Pyongyang yang semakin provokatif sejak tahun 2009. Hal inilah yang membuat Park Geun Hye menolak untuk mempertimbangkan perubahan kebijakannya terhadap Korut setelah kekalahan

² *Ibid.*

³ Govindasam, Geetha . 2019. "Failure of an Inter-Korean Policy: The Case of Trust politik". *International Journal of East Asian Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal. 5.

⁴ Delury, John. 20 April 2016. "Listening to Korea's Liberals". 38 *North*. <https://www.38north.org/2016/04/jdelury042016/>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.

partainya di Pemilu. Langkah ini diambil untuk menghindari semakin terpojoknya sekutu konservatifnya yang tersisa di pemerintahan.⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kekalahan Partai Saenuri berpengaruh besar terhadap stabilitas politik internal Korsel, yang berimplikasi besar terhadap politik luar negeri Park Geun Hye, dalam hal ini, *Trust-Political Policy*. Hal ini dikarenakan distribusi kekuasaan politik Park Geun Hye yang menjadi tidak efektif karena parlemen tidak diisi oleh representasi partainya.

2. Perbedaan Persepsi Lintas Generasi Korsel Tentang Korut

Selain gejala politik domestik, setelah uji coba nuklir Korea Utara pada Februari 2016, Gallup Korea mengindikasikan bahwa lebih dari setengah publik Korsel lebih memilih menutup *Kaesong Industrial Park* dan menanggukhan bantuan ke Korut.⁶ Hal ini ditenggarai oleh pergeseran komposisi demografi Korsel yang didominasi oleh generasi muda. Secara psikologi, generasi muda ini tidak memiliki pengalaman berpisah dengan keluarganya di dalam Perang Korea. Hal ini menyebabkan mayoritas penduduk muda Korsel memiliki antusiasme yang kecil terhadap reunifikasi Korea. Di sisi lain, meluasnya sebuah paham bahwa penyatuan Korea akan dihasilkan baik dari konflik bersenjata atau keruntuhan rezim Pyongyang. Hal ini memicu perpecahan generasi di Korsel. Golongan tua yang masih memiliki pengalaman dengan kerabat mereka di Utara mendukung penuh upaya unifikasi, sedangkan generasi muda (terutama di usia 20-an) kurang antusias dengan hal tersebut.⁷

Akibat dari perpecahan generasi yang diikuti oleh tindakan-tindakan provokatif Korut ini membuat kebanyakan publik Korsel, khususnya kalangan muda skeptis terhadap Korea Utara. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, masyarakat muda Korsel tidak merasa memiliki hubungan kultural dengan orang-

⁵ Choe S.H. "After South Korea Spurns Park Geun-hye, She May Press Agenda Abroad," *New York Times*. 15 April 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/15/world/asia/south-korea-elections-park-geun-hye.html?_r=0. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.

⁶ Jort van Oosterhout. 24 Februari 2016. "Discarding Kaesong: Reviving the Cold War on the Korean Peninsula?". *Foreign Policy Journal*. <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/02/24/discarding-kaesong-reviving-the-cold-war-on-the-korean-peninsula/>. Diunduh pada tanggal 18 Oktober 2021.

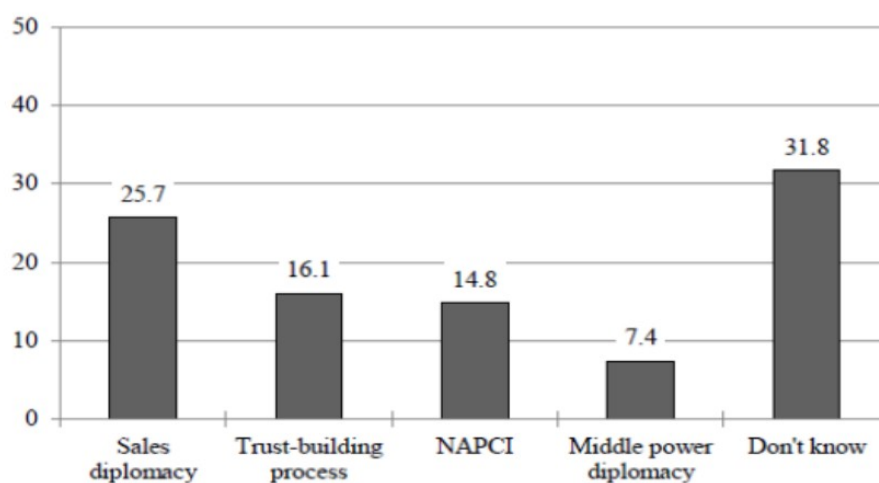
⁷ Geetga Govindasamy. *Loc. Cit.*

orang Korut. Dalam konteks yang lebih luas, dalam laporan *Washington Times* dan *The Diplomat*, golongan muda Korsel semakin disibukkan dengan masalah yang mendesak, seperti keamanan pekerjaan, kehidupan keluarga, dan biaya hidup. Dengan demikian, opini publik Korsel memandang bahwa dana bantuan dalam mekanisme *Trust-Political Policy* lebih baik dialokasikan untuk pembangunan ekonomi domestik.⁸

Selain itu, riset yang dilakukan oleh The Asian Institute dalam 1 tahun pemerintahan Park Geun Hye, seperti yang terlihat dalam Gambar 3.1 dapat dipahami bahwa pengetahuan masyarakat Korea mengenai kebijakan *Trust-Political Policy* dalam mewujudkan unifikasi di Semenanjung Korea bisa dikatakan rendah. Dalam grafik yang dipaparkan dalam Gambar 3.1 mayoritas warga Korea tidak mengetahui secara gamblang mengenai kebijakan trust-politik di Korea Selatan.

Gambar 3.1

Kesan Masyarakat Korea Selatan terhadap Kebijakan Luar Negeri *Trust-Political Policy* Presiden Park Geun Hye (dalam%)



Sumber: Choi Kang, 2014. Evaluating President Park Geun-Hye's Foreign Policy in its 1st Year. *The Asian Institute for Policy Studies*. 24 Februari 2014. <http://en.asaninst.org/contents/evaluating-president-park-geun-hyes-foreign-policy-in-its-1st-year/>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

⁸ Gus Taylor. 10 April 2013. "Young South Koreans fear unification with North would create economic burden". *Washington Times*. <http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/10/young-south-koreans-fear-unification-with-north-wo/?page=all>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021 ;S. Denny. 29 Januari 2015. "The Generation Gap on Korean Unification". *The Diplomat*. <http://thediplomat.com/2015/01/the-generation-gap-on-korean-unification/>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

Pada grafik 3.1 di atas dapat dilihat bahwa makna *Trust-Political Policy* Park Geun Hye bagi publik Korsel adalah *sales diplomacy*. Hal tersebut dikarenakan pada perjalanan karirnya sebagai seorang Presiden, Presiden Park Geun Hye telah menghadiri banyak pertemuan di tingkat Internasional seperti KTT APEC, ASEAN, dan EAS serta banyak pertemuan lagi di luar negeri lainnya. Banyaknya publikasi di media Korea Selatan yang menyorot hal tersebut, tidak bisa dipungkiri banyak warga Korea Selatan yang menganggap bahwa *sales diplomacy* merupakan pilar utama dalam kebijakan luar negeri trust-politik Presiden Park Geun Hye.⁹

3. Lemahnya Sistem Kelembagaan *Trust-Political Policy*

Faktor selanjutnya yang melatarbelakangi kegagalan implementasi *Trust-Political Policy* Park Geun Hye adalah bahwa fungsi Panitia Kepresidenan Persiapan Unifikasi (*Presidential Unification Preparation Committee*) juga tampak tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dimana Dewan Penasihat Unifikasi Nasional (*National Unification Advisory Council-NUAC*), Kementerian Unifikasi memiliki peran yang tumpang tindih.¹⁰

Peran utama Panitia Kepresidenan Persiapan Unifikasi adalah untuk mempersiapkan unifikasi dengan Korut. Di saat yang sama, NUAC berlandaskan pada pasal 92 Konstitusi memiliki fungsi yang serupa, mencakup pengumpulan informasi dan perencanaan unifikasi. Pada saat yang sama, Kementerian Unifikasi yang berperan sebagai mediator dengan Pyongyang, juga dilibatkan dalam masalah unifikasi dan perumusan kebijakan.¹¹ Mengamati dinamika ini, tidak jelas urgensi dan motivasi Park Geun Hye menambahkan lembaga di luar NUAC dalam *Trust-Political Policy*-nya.

⁹ Choi Kang. 24 Februari 2014. "Evaluating President Park Geun-Hye's Foreign Policy in its 1st Year. *The Asian Institute for Policy Studies*". <http://en.asaninst.org/contents/evaluating-president-park-geun-hyes-foreign-policy-in-its-1st-year/>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

¹⁰ Seok Jin-hwan. 8 Agustus 2014. "Park's unification committee's first meeting little more than hot air". *The Hankyoreh*. http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/650384.html. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

¹¹ *Ibid.*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kebijakan luar negeri *Trust-Political Policy* Park Geun Hye tidak memiliki sistem kelembagaan yang padu untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal tersebut mengakibatkan strategi implementasi kebijakan tersebut tidak sistematis, dan berkelanjutan. Bukti yang paling dapat dilihat dari lemahnya kelembagaan ini adalah normalisasi hubungan yang bersifat insidenta seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Selain itu, respon Korsel terhadap sikap agresif Korut tidak seharusnya melalui pendekatan sanksi jika komunikasi Seoul–Pyongyang dapat berjalan dengan efektif.

Selain itu, Prof. Yang Moo-in dari Universitas Studi Korea Utara menyoroti lemahnya objektivitas kebijakan *Trust-Political Policy*. Argumen tersebut didasarkan pada strategi Komite Unifikasi dengan pendekatan 3 langkah, yakni, meningkatkan rekonsiliasi dan kerjasama, membentuk Federasi Inter-Korea, dan kemudian Unifikasi. Prof. Yang menyatakan, “Saya tidak yakin dengan mempersiapkan 3 langkah sekaligus, sedangkan tahap pertama saja belum mampu diwujudkan”.¹²

Kurangnya agenda yang objektif juga dapat diidentifikasi dengan jelas pada Maret 2015, misalnya ketika Wakil Ketua Panitia Kepresidenan Persiapan Unifikasi, Chung Chong-wook menyatakan rencana alternatif untuk unifikasi Semenanjung Korea melalui “arbsorbsi”¹³. Hal ini diikuti oleh Pemerintah Korut yang semakin tidak percaya dengan program *Trust-Political Policy* Park Geun Hye. Politikus Pyongyang menganggap pendekatan yang dilakukan Korsel lebih cocok disebut konfrontasi daripada “kepercayaan” atau “dialog”.¹⁴

Selanjutnya, program *Trust-Political Policy* Park Geun Hye benar-benar berhenti karena ia dimakzulkan dari kursi kepresidenan melalui sidang Parlemen

¹² *Ibid.*

¹³ Kata “Arbsorbsi” diterjemahkan dari naskah aslinya yang menggunakan kata “*absorbition*”. Dilansir dari Collins Dictionary, definisi “*absorbition*” di dalam konteks politik adalah “penyerapan sebuah kelompok ke dalam kelompok yang lebih besar adalah proses menjadi bagian dari kelompok yang lebih besar (*The **absorption** of a group into a larger group is the process of it becoming part of the larger group*). Collins Dictionary. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absorb>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

¹⁴ Geetga Gofindasamy. *Op. Cit.* Hal. 6.

pada 9 Desember 2016.¹⁵ Hal ini membuat kebijakan *Trust-Political Policy* Park Geun Hye tidak pernah benar-benar terwujud untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea.

B. Faktor-Faktor Internasional

Selain faktor-faktor domestik seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat juga faktor internasional yang menyebabkan gagalnya *Trust-Political Policy* menciptakan rekonsiliasi Inter-Korea. Amerika Serikat sebagai aliansi dekat Korsel serta faktor Korea Utara akan dibahas dalam gagalnya *Trust-Political Policy* akan dibahas lebih lanjut di dalam sub-bab ini.

1. Faktor Amerika Serikat

Setiap perbaikan hubungan Inter–Korea sangat bergantung kepada hubungan Washington dengan Seoul dan Pyongyang. Kemenangan Obama di Amerika Serikat dan Park Geun Hye di Korsel pada awal tahun 2012 pada awalnya menawarkan peluang bagi Washington dan Seoul untuk mengkoordinasikan proses diplomatik dan keamanan dengan Pyongyang. Hal ini tidak terwujud karena peningkatan aktivitas provokasi Korut di Semenanjung Korea. Hal ini secara tidak langsung membuat Amerika Serikat menjadikan orientasi denuklirisasi Korut menjadi salah satu kebijakan luar negerinya.¹⁶

Lebih lanjut, faktor personal Obama juga berpengaruh besar di dalam gagalnya *Trust-political Policy* Park Geun Hye. Sejak menjabat sebagai Senator, Obama telah memperlihatkan sikap yang kooperatif dengan Korut. Hal ini dapat dilihat saat pidato Obama di *Senate Committee on Foreign Relations* pada tahun 2005. Dalam kesempatan ini, Obama menyatakan bahwa: “*Strong rhetoric [the Bush Administration] may have boxed itself in ... North Korea is still going to be on the list of evil empires, and causing the North Koreans to be wary of changing their behaviour.*”¹⁷

¹⁵ _____. 30 Maret 2017. “Timeline: South Korea’s Impeached President Park Geun-hye”. *Reuters*. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-timeline-idUSKBN1710MC>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.

¹⁶ Geetha Govindasami. *Op. Cit.* Hal. 6.

¹⁷ B. Obama. 2015. “North Korea: An Update on Six Party Talks and Matters Related to the Resolution of the North Korean Nuclear Crisis,”Hearing Before the Committee on Foreign

Pernyataan tersebut diikuti oleh banyak pernyataan komitmen kooperatifnya dengan Korea Utara. Secara eksplisit, Obama ingin membuka dialog dengan Korut tanpa persyaratan yang kaku, seperti yang diberlakukan oleh pendahulunya, Presiden Bush.¹⁸

Realisasi komitmen politik Obama tersebut tidak terbukti setelah kemenangan Obama pada tahun 2008. Beberapa minggu setelah pelantikan Obama, Korut menyandera 2 orang jurnalis Amerika Serikat di perbatasan dengan Cina. Langkah provokatif Korut di Semenanjung Korea juga memicu Gedung Putih untuk melakukan reorientasi kebijakan luar negeri terhadap Pyongyang. Di lain sisi, di awal pemerintahannya prioritas Obama di dalam pemulihan ekonomi nasional, reformasi kebijakan kesejahteraan domestik, dan reorientasi kebijakan di Timur Tengah secara tidak langsung mengurangi kontak diplomatik Gedung Putih dengan Pyongyang.¹⁹

Dipilihnya Hillary Clinton sebagai Menteri Luar Negeri di pemerintahan Obama juga turut mempengaruhi hubungan AS dan Korut. Seperti suami sekaligus mantan suaminya, Bill Clinton yang merupakan pelopor *Agreed Framework* antara AS dan Korut pada 1994, Clinton telah dicap oleh Republikan garis keras sebagai tokoh yang kompromi terhadap isu keamanan AS. Di awal masa jabatannya, Clinton menunjukkan sikap politik yang cenderung konservatif dalam formulasi kebijakan luar negerinya. Hal ini didukung oleh pernyataan Hillary Clinton, “*strategic patience in close consultations with our six party allies.*”²⁰ Namun sebelum Park Geun Hye, pemerintahan Lee Myung Bak di Korsel yang menolak keterlibatan Seoul dengan Pyongyang, Clinton terpaksa merumuskan diplomasi koersif terhadap Korut.²¹

Relations, United States Senate. Washington: United States Government Printing Office. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg25470/html/CHRG-109shrg25470.htm>. Diunduh pada tanggal 5 November 2021.

¹⁸ _____. 2008. “Obama offers change Kim Jong-Il can believe in”. *World Tribune*. http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2008/ea_nkorea0256_06_19.asp. Diunduh pada tanggal 5 November 2021.

¹⁹ Geetha Govindasami. *Op. Cit.* Hal. 7.

²⁰ Scott. Snyder. Januari 2013. “U.S. Policy Toward North Korea,” Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/node/161137>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

²¹ Park, J.-C. 2008. Lee Myung-Bak Administration’s North Korea Policy: Challenges and Tasks. *The Journal of East Asian Affairs*. Vol. 22. No. 2. Hal. 45.

Pola keseluruhan diplomasi koersif AS–Korsel terhadap Korut yang sebelumnya dikenal sebagai “*strategic patience*”, menghasilkan tindakan lebih lanjut Korut seperti uji coba rudal dan nuklir lanjutan pada 2012, 2013 dan 2016, dan penanaman ranjau darat di sisi DMZ Korea Selatan. Bahkan setelah transisi Presiden Korsel ke Park Geun Hye pada Februari 2013, reputasi Korea Utara yang tidak rasional dan perilaku perang terus membuatnya menjadi “*poster boy*” yang bisa digunakan oleh Pemerintahan Obama untuk menunjukkan ketegasan kebijakan keamanan di luar negeri. Kekuatan militer Korut sangat lemah menyebabkan diplomasi koersif semacam itu dapat dilakukan tanpa risiko konflik regional.²²

Hal tersebut tak sepenuhnya menunjukkan bahwa Pemerintahan Obama memilih untuk mengesampingkan kemungkinan pemulihan hubungan dengan Korut. Melainkan, dengan latar belakang ketegangan dan kecurigaan antara AS dan Korea Utara, Pemerintahan Obama memilih untuk secara signifikan meningkatkan batas yang harus dilewati Pyongyang, sebelum upaya keterlibatan serius dengan Korut dapat dimulai. Hal ini dapat terlihat pada Februari 2016, menyusul dugaan uji coba bom hidrogen oleh Pyongyang, Korut menawarkan kemungkinan perjanjian damai dengan AS untuk secara resmi mengakhiri Perang Korea sebagai titik awal untuk merundingkan perlucutan senjata nuklir Korea Utara.²³

Dalam sudut pandang yang lebih luas, ketegangan antara AS dan Cina atas Laut Cina Selatan dan Timur memberi alasan yang semakin besar bagi AS untuk mempertahankan aset militer yang cukup besar di kawasan Asia Timur. Pada saat yang sama, mengingat bahwa kehadiran militer AS semacam itu akan memprovokasi Cina, Pemerintahan Obama merasa lebih nyaman untuk mempertahankan Korut sebagai pembenaran yang tidak terlalu kontroversial untuk melanjutkan kehadiran militer AS di wilayah tersebut. Dari dinamika tersebut,

²² Choe Sang-Hun. 11 Agustus 2015. “South Korea Accuses the North After Land Mines Maim Two Soldiers in DMZ,” *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2015/08/11/world/asia/north-korea-placed-mines-that-maimed-2-south-korean-soldiers-at-dmz-seoul-says.html>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

²³ Leon V. Sigal. 3 Maret 2016 “The Off-Ramp with North Korea.” *Nautilus Institute*. <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-policy-forum/the-off-ramp-with-north-korea/>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

ditambah baik Washington maupun Pyongyang mengambil prasyarat yang menuntut yang dapat dipenuhi oleh pihak lain sebagai *sine qua non* untuk konsesi timbal balik, sulit untuk kedua belah pihak mengambil langkah pertama untuk keluar dari jalan buntu.²⁴

Dinamika semacam itu semakin diperumit oleh rencana Seoul mengenai pengerahan *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) AS ke Semenanjung Korea. THAAD dimiliki oleh militer AS sebagai sistem pertahanan rudal yang dirancang untuk mencegah rudal jelajah yang masuk ke suatu teritorial. Dengan demikian, secara tidak langsung melindungi simpul logistik utama seperti bandara dan pelabuhan untuk memfasilitasi penyebaran bala bantuan tempur AS ke area operasi tertentu. Semenanjung Korea memiliki prospek strategis terhadap persenjataan rudal nuklir Korut yang mungkin akan digunakan untuk menyerang pangkalan udara dan pelabuhan utama Korsel untuk memblokir penyaluran bantuan AS jika terjadi perang. Mengingat klaim Korea Utara telah berhasil menguji rudal yang diluncurkan dari kapal selam, akhirnya Korea Selatan menyetujui penempatan THAAD. Hal ini semakin memperumit proses diplomasi dengan Pyongyang. Karena THAAD juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pengerahan pasukan tempur AS yang cukup untuk menyerang Korea Utara, ketakutan yang muncul dari pemimpin Korut semakin besar.²⁵

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa faktor Amerika Serikat sangat besar di dalam dinamika hubungan 2 Korea. Dalam hal ini juga mempengaruhi keberhasilan *Trust Political Policy* Park Geun Hye. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa politik luar negeri AS menyebabkan tindakan provokatif Korut. Hal ini tentu menghambat agenda rekonsiliasi antar-Korea. Dalam hal yang lebih spesifik, pemasangan THAAD di Semenanjung Korea juga memperburuk hubungan antar-Korea.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Aaron Mehta. 8 April 2016. "Carter: THAAD in Korea 'Going to Happen,'" *Defense News*. <http://www.defensenews.com/story/defense/international/asia-pacific/2016/04/08/carter-thaad-korea-going-happen/82803470/>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022

2. Faktor Korea Utara

Suksesi Kim Jong Un sebagai pemimpin Korea Utara sejak 2009 dapat menjelaskan sifat ideologi pemerintahan DPRK, sekaligus menjadi faktor besar dalam gagalnya implementasi kebijakan *Trust-Political Policy* Pak Geun Hye. Kurangnya dukungan kepada dua putra Kim Jong Il yang lebih tua karena kurangnya kredibilitas mereka dalam mengikuti ideologi politik Korut dapat mencerminkan preferensi Kim Jong Il untuk kepemimpinan ortodoks. Berbeda dengan ayahnya tersebut, informasi media tentang Kim Jong Un yang melukiskan potret seorang pemimpin yang sangat mirip dengan pendiri Korut, Kim Il Sung. Pendidikan luar negeri Kim Jong Un di Swiss telah menimbulkan harapan awal masyarakat internasional bahwa pemimpin baru Korea Utara akan bersedia untuk memperbaiki kebijakan luar negeri dan reformasi ekonomi yang lebih liberal.²⁶

Latar belakang di atas memberikan penjelasan yang masuk akal untuk pola tindakan Korea Utara sejak Desember 2011. Meskipun kepemimpinan Kim Jong Un tidak diragukan lagi di dalam melewati tantangan ekonomi yang dihadapi Korut, jelas bahwa setiap langkah menuju reformasi ekonomi akan dikontrol dengan ketat. Dalam aspek politik, tampak bahwa Korut memiliki sedikit niat untuk membuat konsesi ke Seoul dan Washington pada program rudal dan nuklirnya antara tahun 2013 dan 2017. Hal ini terlihat dalam dimulainya kembali pembicaraan antara AS dan Korut pada penandatanganan perjanjian "*Leap Year Agreement*" (Perjanjian Tahun Kabisat) pada 29 Februari 2012, dimana Korut setuju untuk mengakhiri uji coba rudal dan nuklir sebagai imbalan bantuan ekonomi dan kemanusiaan dari AS. Namun, perjanjian ini seketika dilanggar ketika Korut mengumumkan rencananya untuk melakukan uji roket *Kwangmyongsong*. Meskipun uji coba rudal April 2012 gagal, diikuti oleh uji coba *Kwangmyongsong* lainnya pada bulan Desember di tahun yang sama yang berhasil mencapai orbit.²⁷

Periode awal tahun 2013 yang ditandai dengan pengujian perangkat nuklir pada bulan Februari, dan peningkatan besar-besaran dalam latihan militer, secara

²⁶ Geetha Govindasami. *Op. Cit.* Hal. 7.

²⁷ Alastair Gale. 8 April 2013. "Pyongyang Threatens to End Venture," *Wall Street Journal*. <http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323550604578410010892971052.html>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

eksplisit mengancam Korsel dan AS. Selain itu, penutupan sementara Kompleks Industri Kaesong pada bulan April 2013 memperburuk hubungan antar-Korea. Tindakan terakhir adalah dipandang sangat mengejutkan, mengingat bahwa Industri Kaesong memberikan hasil ekonomi kepada rezim Pyongyang setara dengan US\$90 juta per tahun. Mengingat keadaan ekonomi Korea Utara yang hampir miskin, kesediaan Pyongyang untuk mengorbankan sebagian besar pendapatannya dapat dilihat sebagai tanda bahwa Kim Jong Un siap untuk meningkatkan konfrontasi dengan Korsel dan AS.²⁸

Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan Korea Utara secara aktif memulai kebijakan *Byungjin* (jalur paralel) yang berusaha untuk mencapai pembangunan ekonomi Korut, yang bersamaan dengan mempertahankan program senjata nuklirnya. Strategi ini dapat terlihat dalam politik domestik Korut dimana terjadi peningkatan faksionalisme di Pyongyang antara kaum moderat pro-reformasi yang memprioritaskan pembangunan ekonomi, dan kelompok garis keras militer yang berniat mempertahankan persenjataan nuklir sebagai jaminan keamanan utama Korut. Pada kongres Partai Buruh Korea pada Mei 2016, tampak jelas bahwa Kongres lebih ditujukan untuk mengkonsolidasikan suksesi kekuasaan Kim Jong Un, daripada mengatasi tantangan-tantangan mendesak negara itu. Selain dari retorika militeristik yang biasa menegaskan ambisi nuklir Korut, hanya sedikit yang menyebutkan langkah apa pun untuk melibatkan AS atau Korea Selatan dalam membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea.²⁹

Tren seperti itu terus berlanjut, mengingat persepsi Korea Utara tentang permusuhan dengan Korea Selatan dan AS. Hal ini semakin didorong oleh latihan militer AS–Korsel yang semakin meningkat pada tahun 2016. Antara Maret dan April 2016, sekutu melakukan latihan militer *Foal Eagle and Key Resolve*, yang dianggap sebagai latihan terbesar kedua negara. Latihan ini melibatkan 317.000 personel militer AS dan Korsel.³⁰ Penciptaan rasa tidak aman yang eksplisit seperti

²⁸ *Ibid.*

²⁹ _____. 26 Februari 2014. "N. Korea Warns against Factionalism in Ruling Party," *Yonhap News*. http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2014/02/26/73/0401000000AEN20140226002100315_F.html. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

³⁰ _____. 7 Maret 2016. "S. Korea, U.S. begin largest-ever anti-North military drills," *Yonhap News*. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20160307007100315>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

itu terhadap Kim Jong Un hampir tidak dapat diharapkan untuk menginspirasi kepercayaan diri untuk meningkatkan hubungan Inter-Korea. Sebaliknya, keadaan tersebut membuat Korut membalas provokasi semacam itu dengan peningkatan pembangkangan dan permusuhan.³¹

Hal tersebut di atas membuat tingkat antagonisme, kecurigaan dan ketidakpercayaan dalam hubungan antar-Korea menjadi sangat kuat. Dalam keadaan seperti itu, sulit untuk membayangkan pihak mana (Seoul atau Pyongyang) yang bersedia mengambil langkah konkrit pertama untuk bergerak merealisasikan retorika *Trust-Political Policy*. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, visi *Trust-Political Policy* pertama kali diperkenalkan Park Geun Hye di Dresden, bekas Jerman Timur pada April 2014. Niat Park Geun Hye untuk mendukung pembangunan kembali Korea Utara dipahami oleh Pyongyang sebagai bukti bahwa ROK mencari penyatuan melalui peleburan. Mengingat bahwa integrasi Dresden ke dalam Republik Federal Jerman menandai bagian dari runtuhnya rezim komunis Jerman Timur, tidak mengherankan jika Korut menafsirkan program *Trust-Political Policy* Park Geun Hye yang ingin menciptakan keruntuhan rezim Korea Utara.

³¹ Geetha Govindasami. *Op. Cit.* Hal. 9.

BAB IV

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat faktor domestik Korsel dan faktor internasional, khususnya dari AS dan Korut yang melatarbelakangi kegagalan *Trust-Political Policy* Park Geun Hye. Faktor domestik yang melatarbelakangi kegagalan tersebut adalah kegagalan Partai Saenuri dan dinamika Politik Domestik Korsel sendiri. Di dalam Pemilu tahun 2016, Partai Saenuri hanya memenangkan 122 kursi di Majelis Nasional yang beranggotakan total sebanyak 300 orang. Partai pengusung Park Geun Hye ini kalah dari partai oposisi utama, Partai Minjoo Korea yang memenangkan 123 suara, sedangkan Partai Rakyat (*The People's party*) memperoleh 38 kursi. Performa mengecewakan dari Partai Saenuri ini juga mengguncang stabilitas administrasi Presiden Park Geun Hye.

Dalam kaitannya dengan Korut, setelah uji coba nuklir Korut pada Februari 2016, Park Geun Hye secara tegas menolak perundingan lebih lanjut dengan Pyongyang. Sebaliknya, Park ingin menjatuhkan sanksi yang lebih keras untuk meruntuhkan rezim Korut. Kebijakan ini gagal diterapkan karena kekalahan elektoral Partai Saenuri di Parlemen seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Pergeseran kekuasaan partai liberal di dalam majelis legislatif Korsel menandakan kebuntuan kebijakan Park Geun Hye yang bercorak konservatif.

Di samping hal tersebut di atas, ditemukan bahwa lebih dari setengah publik Korsel lebih memilih menutup *Kaesong Industrial Park* dan menanggukhan bantuan ke Korut. Hal ini ditenggarai oleh pergeseran komposisi demografi Korsel yang didominasi oleh generasi muda. Secara psikologi, generasi muda ini tidak memiliki pengalaman berpisah dengan keluarganya di dalam Perang Korea. Hal ini menyebabkan mayoritas penduduk muda Korsel memiliki antusiasme yang kecil terhadap reunifikasi Korea. Di sisi lain, meluasnya sebuah paham bahwa penyatuan Korea akan dihasilkan baik dari konflik bersenjata atau keruntuhan rezim Pyongyang. Hal ini memicu perpecahan generasi di Korsel. Golongan tua yang masih memiliki pengalaman dengan kerabat mereka di Utara mendukung penuh

upaya unifikasi, sedangkan generasi muda (terutama di usia 20-an) kurang antusias dengan hal tersebut.

Faktor-faktor di atas sejalan dengan *Rational Choice Theory*, khususnya *Governmental (Bureaucratic) Politics Model*. Allison menjelaskan model ini sebagai perilaku pemerintah yang bukan sebagai output organisasi melainkan hasil dari permainan tawar-menawar. Hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan yang mana pemilihan berdasarkan dukungan dari birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik benang merah bahwa kekalahan Partai Saenuri, guncangan di politik domestik Korsel, dan lemahnya kelembagaan dalam mengimplementasikan *Trust-Political Policy*, sejalan dengan konsep di atas yang menyatakan bahwa hasil dari proses tawar-menawar politik di antara pemain kunci, tawar-menawar dan kompromi hasil dalam kepuasan tidak mengoptimalkan pengambilan keputusan yang mana pemilihan berdasarkan dukungan dari birokrasi yang sukses melobi pemimpin, ambisi pribadi menjadi pertimbangan birokrasi ketika membuat keputusan, permusuhan dan persahabatan terjadi antara birokrasi, serta pendapat pribadi tentang isu-isu yang terjadi, dapat menyimpang sesuai kebutuhan kebijakan publik yang seharusnya diambil.

Dalam hal yang lebih luas, kegagalan *Trust-Political Policy* Park Geun Hye disebabkan oleh lemahnya sistem kelembagaan untuk merealisasikan kebijakan tersebut. Dalam hal ini, Panitia Kepresidenan Persiapan Unifikasi (*Presidential Unification reparation Committee*) juga tampak tidak jelas. Hal ini dapat dilihat dimana Dewa Penasihat Unifikasi Nasional (*National Unification Advisory Council*–NUAC), Kementerian Unifikasi memiliki peran yang tumpang tindih.

Selain itu keseluruhan faktor-faktor yang melatarbelakangi kegagalan *Trust-Political Policy* juga dapat dijelaskan dengan Konsep Kebijakan Luar Negeri. Seperti yang dijelaskan di Bab 1 bahwa William D. Coplin mengemukakan tiga

pertimbangan yang mempengaruhi para pembuat keputusan. Pertama, situasi politik domestik negara termasuk faktor budaya yang mendasari tingkah laku manusianya. Kedua, situasi ekonomi dan militer di negara tersebut termasuk faktor geografis yang menjadi pertimbangan untuk pertahanan dan keamanan. Ketiga, konteks internasional sebagai proyeksi dan manifestasi dari politik domestik terhadap negara yang menjadi tujuan politik luar negerinya. Kebijakan luar negeri dalam konteks ini merupakan keputusan sebagai bentuk dari akumulasi perilaku negara dalam interaksinya dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dirumuskan di dalam negeri yang kemudian diimplementasikan keluar sebagai upaya mencapai kepentingan nasional. Faktor dibagi dalam 3 golongan yaitu keadaan internal, eksternal, dan proses pembuatan keputusan.

Konsep di atas dibuktikan oleh hasil penelitian ini yang menemukan bahwa, selain politik domestik yang menyebabkan kegagalan *Trust-Political Policy*, terdapat juga faktor internasional, diantaranya faktor Amerika Serikat dan Korea Utara. Seperti yang telah dijelaskan di bab sebelumnya, setiap perbaikan hubungan antar-Korea sangat bergantung kepada hubungan Washington dengan Seoul dan Pyongyang. Kemenangan Obama di Amerika Serikat dan Park Geun Hye di Korsel pada awal tahun 2012 pada awalnya menawarkan peluang bagi Washington dan Seoul untuk mengkoordinasikan proses diplomatik dan keamanan dengan Pyongyang. Hal ini tidak terwujud karena peningkatan aktivitas provokasi Korut di Semenanjung Korea. Hal ini secara tidak langsung membuat Amerika Serikat menjadikan orientasi denuklirisasi Korut menjadi salah satu kebijakan luar negerinya.

Namun, diplomasi koersif AS–Korsel terhadap Korut yang sebelumnya dikenal sebagai “*strategic patience*”, menghasilkan tindakan lebih lanjut Korut seperti uji coba rudal dan nuklir lanjutan pada 2012, 2013 dan 2016, dan penanaman ranjau darat di sisi DMZ Korea Selatan. Bahkan setelah transisi Presiden Korsel ke Park Geun Hye pada Februari 2013, reputasi Korea Utara yang tidak rasional dan perilaku perang terus membuatnya menjadi “*poster boy*” yang bisa digunakan oleh Pemerintahan Obama untuk menunjukkan ketegasan kebijakan keamanan di luar

negeri. Kekuatan militer Korut sangat lemah menyebabkan diplomasi koersif semacam itu dapat dilakukan tanpa risiko konflik regional.

Dalam sudut pandang yang lebih luas, ketegangan antara AS dan Cina atas Laut Cina Selatan dan Timur memberi alasan yang semakin besar bagi AS untuk mempertahankan aset militer yang cukup besar di kawasan Asia Timur. Pada saat yang sama, mengingat bahwa kehadiran militer AS semacam itu akan memprovokasi Cina, Pemerintahan Obama merasa lebih nyaman untuk mempertahankan Korut sebagai pembenaran yang tidak terlalu kontroversial untuk melanjutkan kehadiran militer AS di wilayah tersebut. Dari dinamika tersebut, ditambah baik Washington maupun Pyongyang mengambil prasyarat yang menuntut yang dapat dipenuhi oleh pihak lain sebagai *sine qua non* untuk konsesi timbal balik, sulit untuk kedua belah pihak mengambil langkah pertama untuk keluar dari jalan buntu.

Di sisi lain, kepemimpinan Korea Utara secara aktif memulai kebijakan *Byungjin* (jalur paralel) yang berusaha untuk mencapai pembangunan ekonomi Korut, yang bersamaan dengan mempertahankan program senjata nuklirnya. Strategi ini dapat terlihat dalam politik domestik Korut dimana terjadi peningkatan faksionalisme di Pyongyang antara kaum moderat pro-reformasi yang memprioritaskan pembangunan ekonomi, dan kelompok garis keras militer yang berniat mempertahankan persenjataan nuklir sebagai jaminan keamanan utama Korut. Pada kongres Partai Buruh Korea pada Mei 2016, tampak jelas bahwa Kongres lebih ditujukan untuk mengkonsolidasikan suksesi kekuasaan Kim Jong Un, daripada mengatasi tantangan-tantangan mendesak negara itu. Selain dari retorika militeristik yang biasa menegaskan ambisi nuklir Korut, hanya sedikit yang menyebutkan langkah apa pun untuk melibatkan AS atau Korea Selatan dalam membangun rezim perdamaian di Semenanjung Korea.

Peririsan keseluruhan faktor-faktor ini membuat kebijakan *Trust-Political Policy* Park Geun Hye tidak pernah benar-benar terwujud untuk menyatukan kembali Semenanjung Korea. Program *Trust-Political Policy* Park Geun Hye benar-benar berhenti karena ia dimakzulkan dari kursi kepresidenan melalui sidang Parlemen pada 9 Desember 2016.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bakry, U. Suryadi. 2016. *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Coplin, D. William. 1992. *Pengantar Politik Internasional: Suatu Telaah Teoritis*. (diterjemahkan oleh Mercedes Marbun). Bandung: CV Sinar Baru.

Graham, T. Allison. 2009. *Essence of Decision: Explaining the Cuban Missile Crisis*. Canada: Little, Brown & Company Limited.

Hamm, Taik-young. 1999. *Arming the Two Koreas, State, Capital and Military Power*. London dan New York: Routledge.

Kang, Mangil . 2019. *A History of Contemporary Korea*. Leiden: Brill.

Layanan Informasi dan Kebudayaan Korea. 2012. *Korea: Dulu & Sekarang (한국의 어제와 오늘)*. Seoul: Kementerian Budaya, Olahraga dan Pariwisata.

Lloyd, Jensen. 2012. *Explaining Foreign Policy*. Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.

Moleong, J. Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (edisi revisi). Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Saxer, J. Carl. 2002. *From Transition to Power Alternation, Democracy in South Korea 1987-1997*. New York dan London: Routledge.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal Ilmiah:

Amstrong, K. Charles. 2005. "Inter-Korean Relations in Historical Perspective". *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 14. No. 2. Hal: 1-20.

Andrew, O'Neil. 2001. "The 2000 Inter-Korean Summit: The Road to Reconciliation?" *Australian Journal of International Affairs*. Vol. 55. No. 1. Hal: 55-63.

- Foley, A. James. 2003. "'Sunshine' or Showers for Korea's Divided Families?" *World Affairs*. Vol. 165. No. 4. Hal: 179-184.
- Govindasam, Geetha . 2019. "Failure of an Inter-Korean Policy: The Case of Trust politik". *International Journal of East Asian Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal: 1-13.
- James, I. Matray. 2012. "The Korean Armistice Negotiation at Kaesong". *Pacific Historical Review*. Vol. 81. No. 2. Hal: 221-244.
- Ji-hyung, Kim. 2012. "The Development of the Discussions on Unification during the Early Post-Cold War Era: Competition and Coexistence between the Government and Nongovernment Sector". *International Journal of Korean History*. Vol. 17. No. 1. Hal: 171-207.
- Kang, N. Stephanie. 2014. "Building Trust on the Korean Peninsula: An Assessment of Trustpolitik for Inter-Korean Relations". *Pacific Forum CSIS, Issues and Insights*. Vol. 14. No. 13. Hal: 1-17.
- Kim, Yongho. 1999. "Inconsistency or Flexibility? The Kim Young Sam Government's North Korea Policy and Its Domestic Variants". *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal: 225-245.
- Kim, Yongko. 2008. "Inconsistency or Flexibility? The Kim Young Sam Government's North Korea Policy and Its Domestic Variants". *International Journal of Korean Unification Studies*. Vol. 8. No. 1. Hal: 225-245.
- Nadhiva, Faizah, dkk. 2019. "Reorientasi Kebijakan Luar Negeri Republik Korea terhadap Republik Rakyat Demokratik Korea dalam Upaya Reunifikasi". *Global Strategis*. Vol. 13. No. 2.
- Novebrin N. Dhita. 2015. "Sunshine Policy pada Masa Pemerintahan Presiden Lee Myung Bak". *Jurnal HI UMY*. Vol. 1. No. 1. Hal: 1-15.
- Park, C. Jong. 2008. "Lee Myun Bak Administration's North Korea Policy: Challenges and Tasks" *The Journal Of East Asian Affairs*. Vol. 22. No. 2. Hal: 40-64.
- Park, J.-C. 2008. "Lee Myung-Bak Administration's North Korea Policy: Challenges and Tasks. *The Journal of East Asian Affair*". Vol. 22. No. 2. Hal: 39-61.

- Rahmawati, Charneva Umi dan Septyanto Galan Prakoso. 2018. "Trustpolitic Policy Korea Selatan dalam Mewujudkan Unifikasi di Semenanjung Korea Pada Masa Pemerintahan Presiden Park Geun Hye Tahun 2013-2016". *Jurnal HI UNS*. Vol. 1. No. 3. Hal: 1-27.
- Putra F. Andika, "Kebijakan Luar Negeri Korea Utara Dibawah Kepemimpinan Kim Jong Un dalam Proliferasi Nuklir Terhadap Korea Selatan Tahun 2013-2015", *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol. 3. No. 2. Hal: 1-16.
- Sangkeun, Lee & Chung-in, Moon . 2016. "South Korea's Economic Engagement toward North Korea". *Join U.S.-Korea Academic Studies*.
- Strnad, Grażyna. 2010. "The Sixth Republic Under Roh Tae Woo : The Genesis Of South Korean Democracy". *Polish Political Science*. Vol. 39. No. 1.
- Yulianto, B. Eko. 2021. "Sunshine Policy: Kebuntuan Confidence Building Measures Semenanjung Korea pada masa Kim Dae Jung-Roh Moo Hyun". *Jurnal Dinamika Global*. Vol. 6. No. 1. Hal: 1-23.

Tesis:

- Evita. 2015. "Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara: Trust-Politik Policy Park Geun-Hye". Tesis, Jurusan Ilmu Hubungan Internasional., Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Taufik, Resamaili. 2009. "Peredaan Ketegangan dalam Perspektif Konstruktivis: Studi Kasus Konflik Korea Utara – Korea Selatan (2000-2002)", Tesis Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jakarta: Universitas Indonesia.

Website:

- _____. 2008. "Obama offers change Kim Jong-Il can believe in". *World Tribune*. 2008.
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2008/ea_nkorea0256_06_19.asp. Diunduh pada tanggal 5 November 2021.
- _____. 2009. "Mount Kumgang and Inter-Korean Relations". *NCHK Issue Brief*. 10 November 2009. <https://www.ncnk.org/resources/briefing-papers/all-briefing-papers/mt.-kumgang-and-inter-korean-relations>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- _____. 2014. "N. Korea Warns against Factionalism in Ruling Party," *Yonhap News*. 26 Februari 2014.
http://english.yonhapnews.co.kr/northkorea/2014/02/26/73/0401000000A_EN20140226002100315F.html. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

- _____. 2016. "S. Korea, U.S. begin largest-ever anti-North military drills," *Yonhap News*. 7 Maret 2016. <https://en.yna.co.kr/view/AEN20160307007100315>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.
- _____. 2017. "Timeline: South Korea's Impeached President Park Geun-hye". *Reuters*. 30 Maret 2017. <https://www.reuters.com/article/us-southkorea-politics-timeline-idUSKBN1710MC>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.
- _____. 2017. "North Korea's History of Foreign Assassinations and Kidnappings". *BBC News* 14 Februari 2017. <https://www.bbc.com/news/world-asia-38974455>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.
- _____. 2017. "Timeline: North Korean Attacks." *BBC News* 1 April 2013. <https://www.bbc.com/news/10130248>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.
- _____. 2017. A New Dawn in Inter-Korean Relations. *Reuters Graphic*. 21 Juli 2017. <http://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/INTERKOREA-RELATIONS/010041MD3JB/index.html>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- _____. 2018. Tensions With North Korea: The 1968 Pueblo Incident. Roper. 20 Februari 2018. <https://ropercenter.cornell.edu/blog/tensions-north-korea-1968-pueblo-incident>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.
- _____. 2020. Assaults Along the Korean Demilitarized Zone, 1966-69. 20 Agustus 2020. *Weapons and Warfare*. <https://weaponsandwarfare.com/2020/08/20/assaults-along-the-korean-demilitarized-zone-1966-69/>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.
- _____. *Nd.* "North Korean Nuclear Negotiations 1985-2019". *Cfr*. <https://www.cfr.org/timeline/north-korean-nuclear-negotiations>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- Bishop, W. Mac. 2018. "North Korean ex-assassin recalls 1968, when the Korean cold war ran hot". *CNBC News*. 26 Januari 2018. <https://www.nbcnews.com/news/north-korea/north-korean-ex-assassin-recalls-1968-year-mattered-most-n840511>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.
- Choe, S.H. 2016. "After South Korea Spurns Park Geun-hye, She May Press Agenda Abroad," *New York Times*. 15 April 2016, http://www.nytimes.com/2016/04/15/world/asia/south-korea-elections-park-geun-hye.html?_r=0. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.

- Cheon, Seongwhun . 2013. "Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration". *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, <https://www.csis.org/analysis/trust-underlying-philosophy-park-geun-hye-administration>. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2016.
- Davenport, Kelsey. 2020. "Chronology of U.S.-North Korean Nuclear and Missile Diplomacy". *Arms Control Association*. Juli 2020. <https://www.armscontrol.org/factsheets/dprkchron>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- Delury, John. 2016. "Listening to Korea's Liberals". *38 North*. 20 April 2016. <https://www.38north.org/2016/04/jdelury042016/>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Denny, S. 2015. "The Generation Gap on Korean Unification". *The Diplomat*, 29 Januari 2015. 2015. <http://thediplomat.com/2015/01/the-generation-gap-on-korean-unification/>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.
- Gale, Alastair . 2013. "Pyongyang Threatens to End Venture," *Wall Street Journal*. 8 April 2013. <http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323550604578410010892971052.html>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.
- Hyun-jung, Bae. "Saenuri Party Loses Assembly Majority". *The Korea Herald*. 3 April 2016. <http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20160413000611>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2021.
- Jin-hwan, Seok. 2014. "Park's unification committee's first meeting little more than hot air". *The Hankyoreh*. 8 Agustus 2014. http://www.hani.co.kr/arti/english_edition/e_northkorea/650384.html. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.
- Kang, Tae-jun. "Lee Myung-bak: North Korea Sought Inter-Korea Summit Meeting 5 Times". *The Diplomat*. 30 Januari 2015. <https://thediplomat.com/2015/01/lee-myung-bak-north-korea-sought-inter-korea-summit-meeting-5-times>. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2021.
- Keck, Zackhary. 2013. "The Three Faces of Park's "Trustpolitik"". *The Diplomat*. 9 Mei 2013. <https://thediplomat.com/2013/05/the-three-faces-of-parks-trustpolitik/>. Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2021.
- Khawarizmi, Vina A.E. 2021. Review Week 2: Perkembangan Teori Analisa Kebijakan Luar Negeri dalam Hubungan Internasional. Hal. 3. https://www.researchgate.net/publication/348404880_REVIEW_WEEK_2_PERKEMBANGAN_TEORI_ANALISA_KEBIJAKAN_LUAR_NEGE

[RI DALAM HUBUNGAN INTERNASIONAL/link/61c28727abfb4634cb351cd0/download](#). Diunduh pada tanggal 18 Maret 2022.

Klingner, Bruce. 2008. "New South Korean President Bring Conservative Policy Change." *Backgrounder*. 2120. Hal. 4 <http://research.policyarchive.org/13482.pdf>. Diunduh pada tanggal 1 Juli 2021.

Lerner, B. Mitchel. 2018. Remember the Pueblo!. *New York Times*. 23 Januari 2018. <https://www.nytimes.com/2018/01/23/opinion/pueblo-ship-vietnam-war.html>. Diunduh pada tanggal 9 Mei 2021.

Mehta, Aaron. 2016. "Carter: THAAD in Korea 'Going to Happen,'" *Defense News*. 8 April 2016. <http://www.defensenews.com/story/defense/international/asia-pacific/2016/04/08/carter-thaad-korea-going-happen/82803470/>. Diunduh Pada tanggal 20 Januari 2022.

Ministry of Unification. 2013. Trust-Building Process on the Korean Peninsula. Hal. 6 https://www.ncnk.org/sites/default/files/content/resources/publications/trust_buidling_process.pdf. Diunduh pada tanggal 28 Agustus 2021.

Moira Lavelle. 2015. A Brief History of Border Conflict Between North and South Korea. *The World* 20 Agustus 2015. <https://www.pri.org/stories/2015-08-20/brief-history-border-conflict-between-north-and-south-korea>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.

Nathaniel, Felix. 2019. "Park Chung-hee: Bapak Pembangunan Korsel yang Mati Dibunuh", <https://tirto.id/park-chung-hee-bapak-pembangunan-korsel-yang-mati-dibunuh-ejU2>. Diunduh pada tanggal 23 Maret 2020.

Oosterhout, V. Jort. 2016. "Discarding Kaesong: Reviving the Cold War on the Korean Peninsula?". *Foreign Policy Journal*. 24 Februari 2016. <https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/02/24/discarding-kaesong-reviving-the-cold-war-on-the-korean-peninsula/>. Diunduh pada tanggal 18 Oktober 2021.

Sang-Hun, Choe. 2015. "South Korea Accuses the North After Land Mines Maim Two Soldiers in DMZ," *New York Times*. 11 Agustus 2015. <https://www.nytimes.com/2015/08/11/world/asia/north-korea-placed-mines-that-maimed-2-south-korean-soldiers-at-dmz-seoul-says.html>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

Seong-Whun, Cheon. 2013. "Trust – The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration", *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*.

- 6 Mei 2013. <https://www.csis.org/analysis/trust-underlying-philosophy-park-geun-hye-administration>. Diunduh pada tanggal 23 Oktober 2021.
- Sigal, V. Leon. 2016 “The Off-Ramp with North Korea.” *Nautilus Institute*. 3 Maret 2016. <https://nautilus.org/napsnet/napsnet-policy-forum/the-off-ramp-with-north-korea/>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.
- Stent, Dylan. 2020. “Moon’s Plan for Inter-Korean Relations is Actually 40 Years Old”. *The Diplomat*. 23 Oktober 2020. <https://thediplomat.com/2020/10/moons-plan-for-inter-korean-relations-is-actually-40-years-old/>. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- Susanto, Marcel . 2018. “Konflik Sipil-Militer Amerika Serikat dalam Perang Korea”. <https://www.zenius.net/blog/19820/konflik-sipil-militer-perang-korea>. *Zenius*. 28 November 2018. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2020.
- Taylor, Gus. 2013. “Young South Koreans fear unification with North would create economic burden”. *Washington Times*. 10 April 2013. <http://www.washingtontimes.com/news/2013/apr/10/young-south-koreans-fear-unification-with-north-wo/?page=all>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021.
- Tong-Hyung, Kim . 2018. “A look at significant meetings between the Koreas”. *AP News*. 6 Maret 2018. <https://apnews.com/article/ef8eba9f077b4278b0ca4306771dedbf>. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.
- Wertz, Daniel. 2017. “Inter-Korean Relations”. The National Committee on North Korea. *NCKK*. Januari 2017. https://www.ncnk.org/sites/default/files/issue-briefs/NCNK_Issue_Brief_ROK%20DPRK.pdf. Diunduh pada tanggal 21 Oktober 2021.
- Lain-lain:**
- _____. 2012. “Perang Korea, Konflik Ideologi yang Membelah Semenanjung”, <https://www.re-tawon.com/2012/10/perang-korea-konflik-ideologi-yang.html#.XnxNIjcxXI>. Diunduh pada tanggal 18 Maret 2020.
- Cairo Communique. December 3, 1943. http://www.ndl.go.jp/constitution/e/shiryō/01/002_46/002_46_001r.html. Diunduh pada tanggal 4 April 2021.
- Collins Dictionary. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/absorb>. Diunduh pada tanggal 15 November 2021

- Declaration on the Advancement of South-North Korean Relations, Peace and Prosperity. https://www.ncnk.org/sites/default/files/2007_North-South_%20Declaration.pdf. Diunduh pada tanggal 16 Juni 2021.
- Lerner, Mitchell. 2010. "Mostly Propaganda in Nature": Kim Il Sung, the Juche Ideology and the Second Korean War". *North Korea International Documentation Project (Working Paper #3)*. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/documents/misc/NKIDP_Working_Paper_3_Kim_Il_Sung_Juche_Ideology_Second_Korean_War_web.pdf. Diunduh pada tanggal 5 Mei 2021.
- Memorandum of Conversation. (Washington, 15 September 1967). *Foreign Relations Of The United States, 1964–1968, Volume Xxix, Part 1, Korea*. <https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1964-68v29p1/d127>. Diunduh pada tanggal 8 Mei 2021.
- Meriam Webster Dictionary. *Joint Declaration of the Denuclearization of the Korean Peninsula*. https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/KR%20KP_920120_JointDeclarationDenuclearizationKoreanPeninsula.pdf. Diunduh pada tanggal 15 Juni 2021.
- Naskah Lengkap Pidato Pelantikan Presiden Kim Dae Jung 25 Februari 1998 (김대중 대통령 취임사 전문(全文Kim Dae-jung Daetongryeong chui-imsa jeonmun/). *Korea Policy Briefing* 26 Februari 1998. <https://www.korea.kr/archive/governmentView.do?newsId=148741323>. Diunduh pada tanggal 21 Juni 2021.
- Obama, Barack. 2015. "North Korea: An Update on Six Party Talks and Matters Related to the Resolution of the North Korean Nuclear Crisis,"Hearing Before the Committee on Foreign Relations, United States Senate. Washington: United States Government Printing Office. <https://www.govinfo.gov/content/pkg/CHRG-109shrg25470/html/CHRG-109shrg25470.htm>. Diunduh pada tanggal 5 November 2021.
- President Park Geun-Hye's inauguration speech. 26 Februari 2013. https://overseas.mofa.go.kr/fj-en/brd/m_3229/view.do?seq=691211&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&multiitmseq=0&itmseq_1=0&itmseq_2=0&companycd=&companynm=&page=28. Diunduh pada tanggal 29 Agustus 2021.
- Scott, Snyder. 2013. "U.S. Policy Toward North Korea,"Council on Foreign Relations, Januari 2013. <https://www.cfr.org/node/161137>. Diunduh pada tanggal 20 Januari 2022.

The Korean War Armistice Agreement.
https://www.usfk.mil/Portals/105/Documents/SOFA/G_Armistice_Agreement.pdf. Diunduh pada tanggal 4 Mei 2021.